

LAPORAN KINERJA

T.A. 2025

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I

KATA PENGANTAR

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
Ir. Sugeng Harianto, M.Si, M.T



Sebagai Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I bertugas untuk melaksanakan pembangunan serta pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang menjadi tanggung jawabnya. Sepanjang tahun 2025, berbagai program telah dijalankan secara terencana untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sektor sumber daya air.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 disusun untuk menyajikan capaian kinerja BWS Sulawesi I serta menjadi instrumen evaluasi dan komunikasi kinerja dengan pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Laporan ini menyajikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja dalam kerangka Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar target telah tercapai dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan tindak lanjut serta peningkatan kualitas pelaksanaan.

Penyusunan laporan ini juga merupakan hasil dukungan dan kolaborasi berbagai pihak sepanjang Tahun 2025, atas kontribusi yang diberikan, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Melalui Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan tersaji informasi yang akurat, akuntabel, dan dapat menjadi dasar evaluasi serta pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Manado, Januari 2026
Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I

Ir. Sugeng Harianto, M.Si, MT
NIP.19680305 200812 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berlandaskan pada berbagai ketentuan yang mengatur mekanisme pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Landasan utama sistem ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, yang diperkuat dengan sejumlah peraturan turunan, antara lain PerMen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; PerMen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta PerMen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian PUPR. Ketentuan tersebut juga diperbaharui melalui PerMen PU Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas PerMen PUPR Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum. Secara konseptual, SAKIP merupakan sistem yang tersusun secara sistematis mencakup berbagai proses, alat, dan prosedur yang digunakan untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan “kinerja” instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran. Adapun “kinerja” dimaknai sebagai hasil atau keluaran dari pelaksanaan kegiatan atau program yang dapat diukur dari sisi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan sumber daya yang digunakan.

Tujuan penerapan SAKIP adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang berfokus pada pencapaian kinerja melalui mekanisme evaluasi keberhasilan yang terukur, menyusun pelaporan yang berorientasi pada hasil serta sesuai dengan tanggung jawab masing-masing unit kerja, mengintegrasikan manajemen keuangan dengan manajemen kinerja melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja, dan mendorong pimpinan agar aktif melakukan pemantauan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program.

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja yang selaras dengan Visi dan Misi organisasi – yang dijabarkan dalam tujuan dan rencana strategis – yang dikaitkan dengan kerangka rencana pembangunan nasional dan kementerian, termasuk RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis

Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029. Dalam merespons dinamika global dan nasional yang semakin kompleks, Kementerian Pekerjaan Umum melalui visi “Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Berkelanjutan” berkomitmen mewujudkan sistem penyelenggaraan infrastruktur yang unggul dan berkualitas. Ke depannya, Kementerian PU diharapkan untuk secara konsisten melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan menjadi 7 (tujuh) misi Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam kerangka kementerian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memiliki peran sentral dalam memastikan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan. Fungsi ini menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pelaksanaan misi ke-1, yaitu “Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air” dan perwujudan sasaran strategis yang ke-1 “Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air”. Untuk mencapai misi dan perwujudan sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memiliki dua sasaran program teknis dan satu sasaran program generik beserta indikator kinerjanya yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional
 1. Kapasitas tampungan air
 2. Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk
 3. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi
 4. Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk
 5. Efisiensi pemanfaatan air irigasi
 6. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air
 7. Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air
 8. Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas
- b. Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi
 1. Tingkat layanan perizinan berusaha penggunaan SDA, kelembagaan pengelolaan SDA, dan peran serta masyarakat
 2. Tingkat layanan administrasi dan teknis operasional Dewan SDA Nasional

3. Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern Direktorat Jenderal SDA
 4. Tingkat keselarasan perencanaan dan pemrograman Direktorat Jenderal SDA
 5. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal SDA
 6. Tingkat layanan teknis sumber daya air
 7. Tingkat implementasi transformasi digital Direktorat Jenderal SDA
 8. Tingkat nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal SDA
- c. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
1. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJSDA)

Balai Wilayah Sungai Sulawesi I adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I mempunyai tugas “Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I di Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Sasaran Program : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional
 - a. Jumlah kapasitas tampungan air yaitu 58,99 m³/kapita.
 - b. Efisiensi pemanfaatan air irigasi yaitu 0,322 USD/m³.
 - c. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air sebesar 0,06%.
 - d. Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air sebesar 57,74%.
 - e. Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas sebesar 4,13%.
 - f. Persentase kondisi keandalan daerah irigasi sebesar 0,16%.
2. Sasaran Program : Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi
 - a. Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern UPT sebesar 83,90%.
 - b. Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA sebesar 53,57%.

- c. Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada entitas di B/BWS sebesar 100,00%.
 - d. Tingkat implementasi transformasi digital UPT sebesar 15,13 Nilai.
3. Sasaran Program : Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
- a. Tingkat kualitas dukungan manajemen Unit Pelaksana Teknis sebesar 96,72%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian target *output* (fisik) sampai akhir bulan Desember tahun 2025 sebesar 85,84% sedangkan keuangan 88,73%.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan anggaran tahun 2025 pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi I tetap berjalan efisien dan produktif, meskipun mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 90%. Penurunan ini tidak mengurangi kualitas proses pelaksanaan, karena penggunaan sumber daya—termasuk dana, waktu, sarana prasarana, dan SDM—masih mampu menghasilkan output yang relevan dan bermanfaat.

Output infrastruktur yang terbangun, seperti jaringan irigasi, penyediaan air baku, pengendali banjir, pengaman pantai, serta pekerjaan rehabilitasi infrastruktur eksisting, memberikan dampak positif signifikan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja, terutama dalam mendukung program swasembada pangan, energi, dan juga air, serta meningkatkan kesejahteraan. Secara umum, pembangunan bidang sumber daya air pada tahun 2025 tetap menunjukkan kemajuan yang bermakna, meskipun terdapat hambatan administratif, teknis, dan faktor-faktor lainnya. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif telah disiapkan sebagai komitmen peningkatan kinerja pada tahun mendatang, antara lain:

- a. Melakukan perencanaan dan penganggaran rencana program dan kegiatan lebih dini.
- b. Meningkatkan kompetensi manajerial dari tiap personel baik di lapangan maupun di kantor BWS Sulawesi I.
- c. Membuat *command center* sebagai pusat komando antara pekerjaan di lapangan dan juga administrasi di kantor BWS Sulawesi I, agar tercipta koordinasi dan sinergitas yang baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
1.3.1 Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	5
1.3.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja	8
1.3.3 Sumber Daya Manusia	14
1.4 Sarana dan Prasarana	20
1.5 Isu Strategis	24
1.4.1 Isu Strategis WS Dumoga-Sangkub	24
1.4.2 Isu Strategis WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas	29
1.6 Sistematika Laporan	34
BAB II Perencanaan Kinerja	37
2.1 Uraian Singkat Renstra	39
2.1.1 Internalisasi Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029	39
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum	40
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	42
2.2 Perjanjian Kinerja	45
2.3 Metode Pengukuran	48
2.4 Target Tahun 2025 menurut Rencana Strategis	50

BAB III Akuntabilitas Kinerja	53
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	55
3.2 Capaian Kinerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	55
3.2.1 Analisis Penyebab Kegagalan dan Keberhasilan serta Solusi	64
3.2.3 Analisis Kegiatan penunjang Kegagalan/Keberhasilan	66
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja	67
3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Beberapa Tahun Terakhir.....	67
3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra).....	70
3.3.3 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun ini dengan Tahun Lalu	72
3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional.....	73
3.4 Analisis Realisasi Anggaran	74
3.4.1 DIPA Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	76
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	83
BAB IV Penutup	85
4.1 Kesimpulan.....	87
4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja	87
4.3 Rekomendasi Langkah dan Tindak Lanjut	88
LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.....	5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.....	9
Gambar 1.3 Diagram Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Gambar 2.1 Cascading Kinerja Program Ketahanan Sumber Daya Air (DJSDA) ...	42
Gambar 2.2 Sertifikat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BWS Sulawesi I.....	47
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi Penyerapan T.A. 2023 – 2025	72
Gambar 3.2 Persentase Sumber Dana BWS Sulawesi I T.A. 2025	73
Gambar 3.3 Perbandingan Pagu Awal vs Pagu Akhir tiap Satuan Kerja.....	77
Gambar 3.4 Histori Pagu Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.....	78
Gambar 3.5 Histori Pagu Satuan Kerja SNVT PJPA Sulawesi I Prov. Sulawesi Utara	79
Gambar 3.6 Histori Pagu Satuan Kerja SNVT PJSA Sulawesi I Prov. Sulawesi Utara	80
Gambar 3.7 Histori Pagu Satuan Kerja SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi I	81
Gambar 3.8 Histori Pagu Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi I	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan/Golongan (Pria)	14
Tabel 1.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan/Golongan (Wanita).....	15
Tabel 1.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Pria)	16
Tabel 1.4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Wanita).....	17
Tabel 1.5 Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia.....	19
Tabel 1.6 Daftar Sarana dan Prasarana BWS Sulawesi I (BMN)	20
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum	41
Tabel 2.2 Cara Pengukuran Sasaran BWS Sulawesi I.....	49
Tabel 2.3 Target BWS Sulawesi I t.a. 2025 mengacu Renstra 2025-2029	51
Tabel 3.1 Sasaran Program BWS Sulawesi I.....	56
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja T.A. 2024 dan 2025	67
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja T.A. 2025 dengan Renstra	71
Tabel 3.4 Perbandingan Penyerapan Anggaran T.A. 2023 - 2025	72
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja di Level Nasional	73
Tabel 3.6 Peringkat BWS Sulawesi I antar BWS dan BBWS.....	74
Tabel 3.7 Peringkat BWS Sulawesi I antar BWS	75

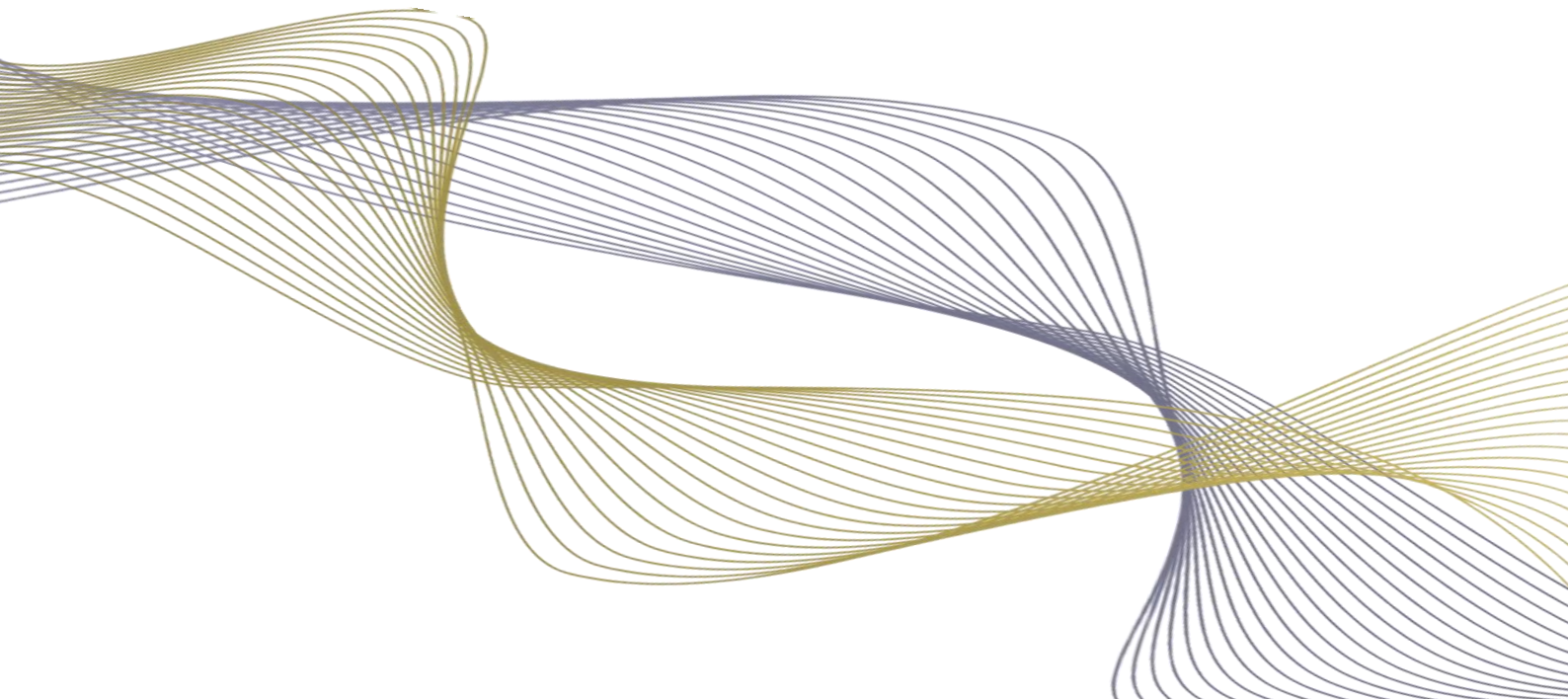
DAFTAR SINGKATAN

DJSDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian PU	Kementerian Pekerjaan Umum
UPT	Unit Pelaksana Teknis
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Renstra	Rencana Strategis
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DIPA	Daftar Isian Pelaksana Anggaran
BMN	Barang Milik Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
ASN	Aparatur Sipil Negara
SS	Sasaran Strategis
SP	Sasaran Program
SK	Sasaran Kegiatan
K/L	Kementerian/Lembaga
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BWS	Balai Wilayah Sungai
SNVT	Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
PJPA	Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
PJSA	Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
Satker	Satuan Kerja
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
Perpres	Peraturan Presiden
Permen	Peraturan Menteri
UU	Undang-Undang
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



BAB I Pendahuluan

Laporan Kinerja – Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
2025



1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja yang selaras dengan Visi dan Misi organisasi – yang dijabarkan dalam tujuan dan rencana strategis – yang dikaitkan dengan kerangka rencana pembangunan nasional dan kementerian, termasuk RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029.

Landasan utama dari penyusunan laporan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, yang diperkuat dengan sejumlah peraturan turunan, antara lain PerMen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; PerMen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta PerMen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.2 Tugas dan Fungsi

Balai Wilayah Sungai Sulawesi I adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I mempunyai tugas “Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai” yang menjadi kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan pola pengelolaan sumber daya air, dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

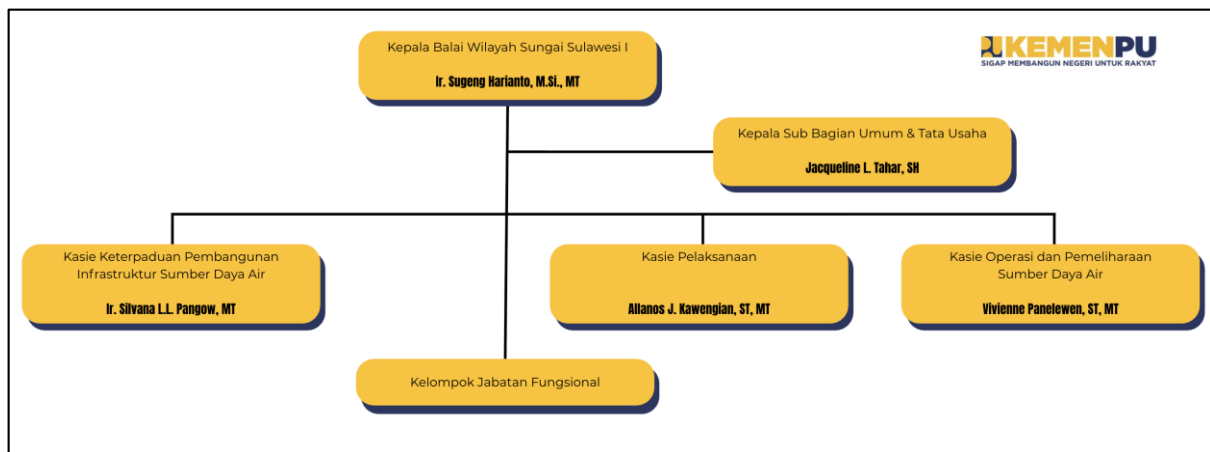
- c. Penyusunan studi kelayakan, perencanaan dan fasilitas pengadaan tanah, dan perencanaan teknis atau desain pengembangan sumber daya air;
- d. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- g. Pengelolaan drainase utama perkotaan;
- h. Pengelolaan sistem hidrologi;
- i. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- j. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- k. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- l. Penyusunan dan penyiapan klarifikasi teknis dan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- m. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis untuk pemanfaatan irigasi dan pengalihan alur sungai;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan kajian dan fasilitasi penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa;
- o. Fasilitas kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- p. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- q. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik/kekayaan negara selaku unit akuntansi wilayah serta pengaman barang milik/kekayaan negara;
- r. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penanggungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- s. Penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja balai, dan penilaian mandiri *River Basin Organization*;
- t. Pelaksanaan pemantuan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;

- u. Pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas, pelaksanaan fungsi kepatuhan intern dan manajemen resiko sesuai dengan kewenangannya, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai; dan
- v. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik dan layanan hukum.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sulawesi I

Struktur Organisasi dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi I berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sulawesi I

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian berdasarkan PerMen PU Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 40 adalah sebagai berikut:

1.3.1.1 Sub Bagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian, pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, penyusunan administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga, pelaksanaan komunikasi publik dan layanan hukum, penatausahaan, pengelolaan, administrasi, dan akuntansi barang milik/kekayaan negara, pengamanan fisik barang milik/kekayaan negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, pelaksanaan koordinasi kegiatan terkait penanganan bencana, pelaksanaan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai, serta pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas.

1.3.1.2 Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, pemberian masukan atas rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota/provinsi, pelaksanaan analisis dan evaluasi kelayakan kegiatan, lingkungan dan perencanaan pengadaan tanah, penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, fasilitasi dan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja, pelaksanaan koordinasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan pengelolaan hidrologi dan kualitas air serta sistem informasi dan data sumber daya air, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyiapan koordinasi atas pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko, dan pelaksanaan penyusunan penilaian mandiri *River Basin Organization*.

1.3.1.3 Seksi Pelaksanaan

Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, rencana teknik dan pengawasan bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan

air baku serta konservasi air tanah, air baku, embung dan tampungan air lainnya beserta sarana dan prasarananya, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, pelaksanaan persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air, pengelolaan prasarana irigasi dan rawa strategis, pengelolaan prasarana air tanah, air baku dan embung strategis, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana jaringan sumber air di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku serta konservasi air tanah, air baku, embung dan tampungan air lainnya beserta sarana dan prasarananya, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengamanan pantai strategis.

1.3.1.4 Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, koordinasi dan fasilitasi persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang/jasa, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana alam, fasilitasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di waduk, pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sistem peringatan dini sumber daya air, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana alokasi air tahunan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan kajian dan fasilitasi penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pelaksanaan penyusunan klarifikasi teknis dan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air, pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis pemanfaatan irigasi dan pengalihan alur sungai, pelaksanaan pemantauan dan

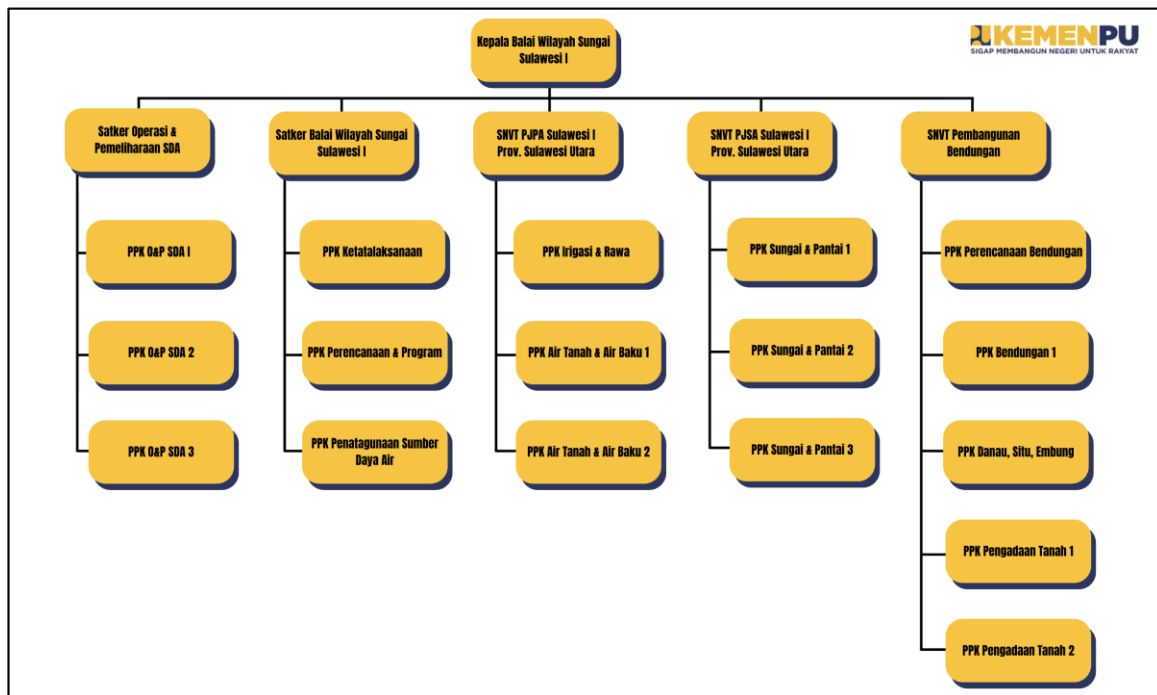
pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, dan pelaksanaan, pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

1.3.1.5 Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana (Pasal 202)

Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dibentuk 5 (lima) satuan kerja yaitu Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara, SNVT Pembangunan Bendungan dan Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Provinsi Sulawesi Utara. Adapun Struktur Organisasi serta Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, Lampiran 3.a Ketentuan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana terlampir di gambar.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I

1.3.2.1 Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I

Terdiri atas tiga unit kerja, yaitu Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Program, dan Penatagunaan Sumber Daya Air (PSDA). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap unit kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, antara lain:

a. Ketatalaksanaan

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan anggaran serta administrasi dan akuntansi keuangan;
- Pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi, dan akuntansi barang milik negara (BMN);
- Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- Penyusunan laporan berkala balai;
- Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara sebagai unit akuntansi wilayah; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga balai.

b. Perencanaan dan Program

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- Penyusunan rencana pengelolaan awasan lindung sumber daya air pada Wilayah Sungai;
- Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran;
- Penyiapan, penyusunan rencana, dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan bimbingan teknis dalam penyusunan program; dan
- Pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi public.

c. Penatagunaan Sumber Daya Air (PSDA)

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian Penatagunaan Sumber Daya Air (PSDA) menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan Pola dan Rencana PSDA WS;
- Pelaksanaan evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat, dan dampak kegiatan PSDA WS;
- Penyiapan rekomtek dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan SDA pada Wilayah Sungai;
- Pengelolaan sistem hidrologi dan peringatan dini;
- Fasilitasi kegiatan TKPSDA pada Wilayah Sungai; dan
- Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan SDA.

1.3.2.2 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sulawesi I

Satuan kerja ini memiliki tugas-tugas penting dalam pengelolaan sumber daya air. Tugas-tugas tersebut mencakup penyusunan rencana kegiatan, penyusunan perencanaan teknik, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik di berbagai bidang, seperti sungai, pantai, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya. Selain itu, tugas tersebut melibatkan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi, dan pemeliharaan, serta pemberdayaan masyarakat di sektor

jaringan sumber air. Selama melaksanakan tugas-tugas ini, SNVT PJSA Sulawesi I menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan, dan tampungan air;
- Penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, embung, bendungan, dan tampungan air lainnya termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, embung, bendungan, dan tampungan air lainnya termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, embung, bendungan, dan tampungan air lainnya termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- Penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, embung, bendungan, dan tampungan air lainnya yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, embung, bendungan, dan tampungan air lainnya.

1.3.2.3 SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sulawesi I

Satuan kerja ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan perencanaan teknik, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik bidang irigasi, rawa, dan tambak, air tanah, air baku, konservasi tampungan air, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air, serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana jaringan sumber air di bidang irigasi, rawa, dan tambak, air tanah, dan air baku, konservasi tampungan air, air tanah, dan air baku, serta sarana dan prasarana

konservasi air tanah dan air baku. Dalam melaksanakan tugasnya, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan perencanaan teknis irigasi, rawa, tambak, air baku, dan air tanah;
- Penyusunan rencana persiapan OP sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku, dan air tanah;
- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku, dan air tanah termasuk pemantauan dan evaluasinya;
- Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku, dan air tanah;
- Penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku, dan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku, dan air tanah.

1.3.2.4 SNVT Pembangunan Bendungan

Satuan kerja ini mempunyai tugas melaksanakan penetapan rencana umum pengadaan, perencanaan operasional pengawasan dokumen administrasi dan teknis, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran pada kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan revitalisasi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya. Selain itu, satuan kerja ini melaksanakan pengujian dan penelitian terhadap data validasi pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah, mengajukan usulan pembayaran ganti kerugian kepada Kuasa Pengguna Anggaran, serta mengusulkan penyediaan aset pengganti dalam hal ganti kerugian tidak berupa uang. Dalam melaksanakan tugasnya, SNVT Pembangunan Bendungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan dan penetapan rencana umum pengadaan untuk kegiatan konstruksi pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya;

- Pelaksanaan perencanaan operasional pengawasan atas dokumen administrasi dan dokumen teknis pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya;
- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran pada kegiatan konstruksi dan rehabilitasi bendungan serta bangunan penampung air lainnya;
- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran pada kegiatan revitalisasi danau, situ, dan embung;
- Pelaksanaan pengujian, verifikasi, dan penelitian dokumen terkait surat validasi pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah serta kelengkapan data pelaksana pengadaan tanah;
- Pengajuan usulan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Pengusulan penyediaan aset pengganti apabila bentuk ganti kerugian pengadaan tanah diberikan dalam bentuk selain uang.

1.3.2.5 Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi I

Satuan kerja ini bertugas untuk melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, pelaksanaan penyusunan rencana alokasi air tahunan, pelaksanaan penyusunan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ dan garis sempadan jaringan irigasi, fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air serta, pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya, Satker O&P SDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan, pengendalian, dan pengawasan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;

- Pelaksanaana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- Pemantauan dan pengevaluasian kelayakan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana SDA;
- Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- Penyediaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
- Pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana; dan
- Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan.

1.3.3 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Data Kepegawaian Balai Wilayah Sungai Sulawesi I tahun 2025, jumlah total pegawai yang ada di unit kerja adalah 517 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN). Sebaran pegawai berdasarkan statusnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan/Golongan (Pria)

Satker	Jumlah Pegawai (Pria)						
	ASN						Non ASN
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	PPPK	Paruh Waktu	Tenaga Pendukung/KI
Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	-	4	10	4	43	1	9
Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi I	-	9	9	-	76	11	22
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemafaatan Air (PJPA) Sulawesi I	-	8	12	2	6	2	37

Satker	Jumlah Pegawai (Pria)						
	ASN						Non ASN
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	PPPK	Paruh Waktu	Tenaga Pendukung/KI
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sulawesi I	-	2	16	1	10	2	7
SNVT Pembangunan Bendungan	-	1	12	-	15	3	28
Jumlah	-	24	59	7	150	19	103

Tabel 1.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan/Golongan (Wanita)

Satker	Jumlah Pegawai (Wanita)						
	ASN						Non ASN
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	PPPK	Paruh Waktu	Tenaga Pendukung/KI
Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	-	1	14	2	7	1	14
Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi I	-	-	8	-	16	1	13
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemafaatan Air (PJPA) Sulawesi I	-	-	6	-	4	-	21

Satker	Jumlah Pegawai (Wanita)						
	ASN						Non ASN
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	PPPK	Paruh Waktu	Tenaga Pendukung/KI
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sulawesi I	-	1	3	-	3	1	12
SNVT Pembangunan Bendungan	-	2	8	1	9	1	6
Jumlah	-	4	39	3	39	4	66

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah ASN yaitu 353 orang dengan pembagian PNS sebanyak 140 orang, PPPK sebanyak 190 orang, dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 23 orang. Selain itu, ASN juga dibantu oleh pegawai-pegawai non-ASN dengan jumlah total yaitu 169 orang. Dengan jumlah yang ada sekarang, kepegawaian melakukan analisa dan mendapatkan hasil bahwa masih perlu adanya tambahan SDM guna mendukung pencapaian kinerja balai khususnya di Satuan Kerja fisik.

Untuk sebaran berdasarkan latar belakang pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

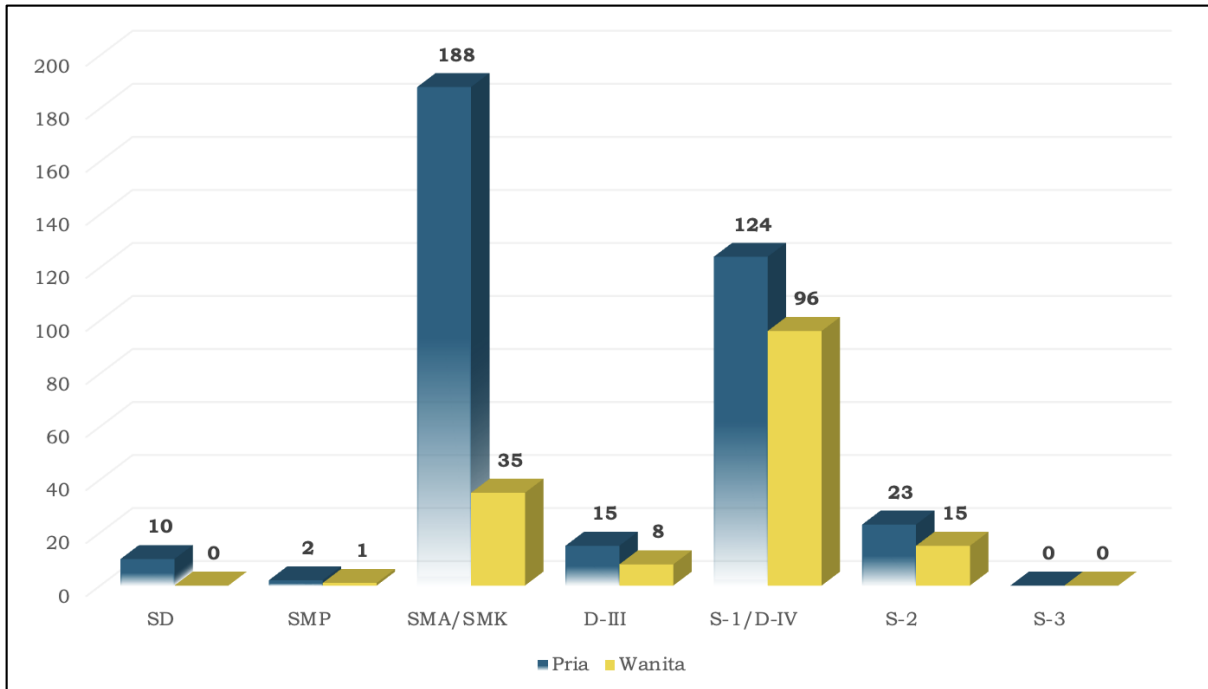
Tabel 1.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Pria)

Satker	Jumlah Pegawai (Pria)						
	SD	SMP	SMA/SMK	D-III	S-1	S-2	S-3
Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	5	1	33	3	24	5	-
Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi I	5	1	95	3	20	3	-

Satker	Jumlah Pegawai (Pria)						
	SD	SMP	SMA/SMK	D-III	S-1	S-2	S-3
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemafaatan Air (PJPA) Sulawesi I	-	-	17	3	39	8	-
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sulawesi I	-	-	14	4	15	5	-
SNVT Pembangunan Bendungan	-	-	29	2	26	2	-
Jumlah	10	2	188	15	124	23	-

Tabel 1.4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Wanita)

Satker	Jumlah Pegawai (Wanita)						
	SD	SMP	SMA/SMK	D-III	S-1	S-2	S-3
Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	-	-	8	4	24	3	-
Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi I	-	-	13	1	22	2	-
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemafaatan Air (PJPA) Sulawesi I	-	-	2	-	23	6	-
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sulawesi I	-	-	5	1	14	-	-
SNVT Pembangunan Bendungan	-	1	7	2	13	4	-
Jumlah	-	1	35	8	96	15	-



Gambar 1.3 Diagram Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikannya, SDM yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado didominasi oleh Pendidikan SMA/SMK dengan jumlah 223 orang, disusul oleh pendidikan Sarjana S-1/D-IV dengan jumlah 220 orang, dan pendidikan Magister S-2 dengan jumlah 38 orang.

Secara keseluruhan, komposisi tingkat pendidikan pegawai di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado – yang sebagian besar merupakan lulusan SMA/Sederajat dan Sarjana S-1/D-IV – telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas, baik pekerjaan lapangan maupun administrasi di kantor. Meskipun demikian, peningkatan kualitas SDM tetap dibutuhkan agar kinerja organisasi dapat berkembang lebih optimal. Upaya ini dapat dilakukan dengan membuka peluang pengembangan kompetensi, seperti memberikan kesempatan bagi pegawai berpendidikan Sarjana S-1 untuk melanjutkan studi ke jenjang Pascasarjana S-2, serta mendorong pegawai lulusan Diploma D-III agar dapat menambah kualifikasi melalui pendidikan lanjutan ke jenjang Sarjana S-1.

Untuk sebaran pegawai berdasarkan usia dan gender dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Satker	Pria (Tahun)			Wanita (Tahun)		
	18 - 31	32 - 45	>46	18 - 31	32 - 45	>46
Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	13	33	25	12	8	19
Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi I	24	55	48	13	16	9
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemafaatan Air (PJPA) Sulawesi I	23	28	16	15	10	6
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJPA) Sulawesi I	7	13	18	11	2	7
SNVT Pembangunan Bendungan	14	26	19	5	12	10
Jumlah	81	155	126	56	48	51

Berdasarkan tabel di atas, Sebaran pegawai di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado didominasi oleh kelompok usia 32–45 tahun, baik pria maupun wanita. Kelompok usia ini merupakan usia produktif yang berperan utama dalam pelaksanaan kegiatan teknis, operasional, dan administrasi di seluruh satuan kerja. Selain itu, jumlah pegawai pada kelompok usia >46 tahun juga cukup signifikan, khususnya pegawai pria, yang mencerminkan ketersediaan SDM berpengalaman dalam mendukung fungsi pengawasan dan pembinaan.

Sementara itu, pegawai pada kelompok usia 18–31 tahun masih relatif lebih sedikit dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap aspek regenerasi pegawai melalui rekrutmen dan pengembangan kompetensi SDM muda guna menjamin keberlanjutan kinerja dan organisasi Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado di masa mendatang.

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas. Rekapitan jumlah sarana dan prasarana yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Daftar Sarana dan Prasarana BWS Sulawesi I (BMN)

No	Kelompok>Nama Peralatan	Satuan	Volume	Keterangan
A	Tanah			
1	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Tinggal	m2	39.577	Baik
2	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	m2	181.080	Baik
3	Tanah Kering	m2	290.147	Baik
4	Tanah Untuk Bangunan Air	m2	5.295.537	Baik
B	Peralatan dan Mesin			
1	Excavator	Unit	1	Baik
2	Hauler	Unit	1	Baik
3	Alat Pengangkat	Unit	2	Baik
4	Mesin Proses Apung	Unit	6	Baik
5	<i>Electric Generating Set</i>	Unit	32	Baik
6	Pompa	Unit	113	Baik
7	Mesin Bor	Unit	2	Baik
8	Unit Pemeliharaan Lapangan	Unit	54	Baik
9	Peralatan Selam	Unit	2	Baik
10	Kendaraan Bermotor Penumpang	Unit	8	Baik
11	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Unit	29	Baik
12	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	Unit	3	Baik
13	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	Unit	1	Baik
14	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	Unit	4	Baik
15	Perkakas Bengkel Kayu	Buah	13	Baik
16	Perkakas Pengangkat	Buah	1	Baik
17	Perkakas Standard (Standard Tools)	Buah	24	Baik
18	Alat Ukur Universal	Buah	2	Baik
19	Alat Kalibrasi	Buah	4	Baik
20	Alat Ukur/Pembanding	Buah	14	Baik
21	Alat Ukur Lainnya	Buah	109	Baik
22	<i>Specific Set</i>	Buah	1	Baik
23	Alat Pengukur Keadaan Alam	Buah	41	Baik
24	Alat Ukur Lainnya	Buah	1	Baik

No	Kelompok>Nama Peralatan	Satuan	Volume	Keterangan
25	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	Buah	3	Baik
26	Alat Laboratorium Pertanian	Buah	7	Baik
27	Alat Reproduksi (Penggandaan)	Buah	3	Baik
28	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Buah	105	Baik
29	Alat Kantor Lainnya	Buah	43	Baik
30	Alat Kantor Lainnya	Buah	1	Baik
31	Meubelair	Buah	547	Baik
32	Alat Pembersih	Buah	14	Baik
33	Alat Pendingin	Buah	37	Baik
34	Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	Buah	20	Baik
35	Alat Rumah Tangga Lainnya	Buah	1	Baik
36	Peralatan Studio Audio	Buah	44	Baik
37	Peralatan Studio Video dan Film	Buah	38	Baik
38	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	Buah	36	Baik
39	Alat Komunikasi Telephone	Buah	28	Baik
40	Switcher Antena	Buah	1	Baik
41	Sumber Tenaga	Buah	73	Baik
42	Alat Laboratorium Hidrokimia	Buah	3	Baik
43	Alat Laboratorium Model Hidrolika	Buah	35	Baik
44	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	Buah	1	Baik
45	Alat Laboratorium Hidrodinamika	Buah	2	Baik
46	Alat Laboratorium Klimatologi	Buah	13	Baik
47	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	Buah	2	Baik
48	Alat Laboratorium Oseanografi	Buah	3	Baik
49	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Buah	2	Baik
50	System/Power Supply	Buah	13	Baik
51	Meteorological Equipment	Buah	2	Baik
52	Alat Laboratorium Kualitas Udara	Buah	14	Baik
53	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	Buah	6	Baik
54	Komputer Jaringan	Buah	15	Baik
55	Personal Komputer	Buah	161	Baik
56	Peralatan Mainframe	Buah	8	Baik
57	Peralatan Personal Komputer	Buah	142	Baik
58	Peralatan Jaringan	Buah	35	Baik
59	Peralatan Komputer Lainnya	Buah	4	Baik

No	Kelompok>Nama Peralatan	Satuan	Volume	Keterangan
60	Ukur/Instrument	Buah	11	Baik
61	Elektronik/Electric	Buah	2	Baik
C	Gedung dan Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	Unit	16	Baik
2	Bangunan Gedung	Unit	2	Baik
3	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Unit	2	Baik
4	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Unit	1	Baik
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit	80	Baik
6	Rumah Negara Golongan I	Unit	4	Baik
7	Rumah Negara Golongan II	Unit	7	Baik
8	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Unit	2	Baik
9	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	Unit	38	Baik
D	Jalan dan Jembatan			
1	Jalan Khusus Inspeksi	m2	1	Baik
E	Irigasi			
1	Bangunan Pengambilan Irigasi	Unit	42	Baik
2	Bangunan Pembawa Irigasi	Unit	40	Baik
3	Bangunan Pengaman Irigasi	Unit	1	Baik
4	Bangunan Pelengkap Irigasi	Unit	46	Baik
5	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	Unit	1	Baik
6	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	Unit	2	Baik
7	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Unit	2	Baik
8	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Unit	128	Baik
9	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Unit	6	Baik
10	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Unit	10	Baik
11	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Unit	8	Baik
12	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Unit	6	Baik
13	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Unit	350	Baik
14	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	Unit	5	Baik
15	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Unit	10	Baik
16	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	Unit	1	Baik

No	Kelompok>Nama Peralatan	Satuan	Volume	Keterangan
17	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Unit	3	Baik
F	Jaringan			
1	Instalasi Air Tanah Dalam	Unit	133	Baik
2	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Unit	1	Baik
3	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Unit	1	Baik
4	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Unit	3	Baik
5	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Unit	10	Baik
6	Jaringan Sambungan ke Rumah	Unit	2	Baik
7	Jaringan Transmisi	Unit	4	Baik
G	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan			
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Unit	5	Baik
2	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Unit	1	Baik
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Unit	3	Baik
4	Alat Laboratorium Pertanian	Buah	5	Baik
5	Muebelair	Buah	3	Baik
6	Instrument Probe/Sensor	Buah	34	Baik
7	Personal Komputer	Buah	34	Baik
8	Bangunan Gedung Kantor	Unit	4	Baik
9	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	Unit	1	Baik
10	Bangunan Pengambilan Irigasi	Unit	7	Baik
11	Bangunan Pembawa Irigasi	Unit	3	Baik
12	Bangunan Pelengkap Irigasi	Unit	114	Baik
13	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Unit	5	Baik
14	Buku	Buah	1	Baik
15	Bahan Kartografi	Buah	1	Baik

Sarana dan prasarana yang tersedia tersebut telah memberikan dukungan penting dalam kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Dengan pemanfaatan yang optimal, infrastruktur kerja ini tidak hanya menunjang efektivitas operasional, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ke depan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana tetap menjadi perhatian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan semakin efisien dan responsif terhadap kebutuhan.

1.5 Isu Strategis

Balai Wilayah Sungai Sulawesi I menaungi dua Wilayah Sungai yang menjadi fokus utama pengelolaan sumber daya air. Masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang memunculkan berbagai isu strategis terkait pengelolaannya baik kaitannya dengan isu strategis nasional maupun lokal.

1.4.1 Isu Strategis WS Dumoga-Sangkub

1.4.1.1 Isu Strategis Nasional

a. Ketahanan Air

Program *Millennium Development Goals* (MDGs) dalam penyediaan air bersih dilanjutkan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menargetkan pemenuhan kebutuhan air bagi seluruh masyarakat pada tahun 2030. Pemerintah menegaskan komitmen tersebut melalui sasaran 100-0-100, yaitu 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak pada tahun 2019.

Dalam RPJMN 2025–2029 dengan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu dari 17 program prioritas nasional adalah swasembada pangan, energi, dan air. Ketahanan air diwujudkan melalui konservasi, zonasi pemanfaatan berbasis daerah tangkapan dan resapan air, serta jaminan ketersediaan air bagi masyarakat dan lingkungan. Target penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri (RKI) ditetapkan sebesar 1.127 l/dtk pada 2025 dan meningkat menjadi 1.326 l/dtk pada 2045. Saat ini, layanan air bersih di WS Dumoga–Sangkub mencapai 903 l/dtk (80% dari kebutuhan), terutama di Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan debit andalan (Q95%) sebesar 4,95 miliar m³/tahun, WS Dumoga–Sangkub diproyeksikan tidak mengalami defisit air hingga tahun 2045.

b. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi pemenuhan kebutuhan pokok pangan untuk setiap rumah tangga yang dicerminkan oleh ketersediaan pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan secara umum didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan yaitu padi dan palawija melalui sawah irigasi dan tadah hujan. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Produksi padi di WS. Dumoga-Sangkub pada Tahun 2024 adalah sebesar ±214.657 Ton, atau sekitar ±120.623 Ton beras sedangkan untuk kebutuhan beras di WS Dumoga-Sangkub sebesar ±94.459 Ton/Tahun pada jumlah penduduk Tahun 2025

dan sebesar ±113,848 Ton/Tahun pada proyeksi pertumbuhan penduduk sampai tahun 2045. Terjadi surplus beras sebanyak 26.165 Ton/Tahun, kelebihan atau surplus beras tersebut di distribusikan di WS terdekat yaitu WS Tondano-Sangihe-Talau-Miangas dan WS Poigar Ranoyapo yang defisit/kekurangan produksi tanaman padi. Produksi tersebut didukung oleh jaringan irigasi fungsional yang melayani areal irigasi sebesar ± 31.415 ha dari total areal irigasi potensial ±49.047 ha dan sudah tidak ada pengembangan untuk areal irigasi yang baru. Berdasarkan kajian neraca air Tahun 2024, terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang didalamnya terdapat penggunaan air irigasi mempunyai status defisit air sebanyak 23 DAS dari total 253 DAS, akan tetapi sebagian besar dapat di tanggulangi dengan membuat pengalokasian air dengan mengurangi secara proposional pada kebutuhan akan aliran pemeliharaan Sungai.

c. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global sebagai fenomena alam harus diantisipasi dengan menciptakan dan meningkatkan daya dukung DAS yang kritis. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekwensi, maupun intensitas kejadian cuaca ekstrem. *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistem pantai. Berdasarkan data proyeksi perubahan iklim periode 2020 – 2049 oleh BMKG dapat disimpulkan :

- Proyeksi Perubahan Curah hujan Musiman Bulan September-Oktober-November pada WS Dumoga-Sangkub adalah bertambah sebesar 5-10 %;
- Proyeksi Perubahan jumlah hari hujan lebat di bulan Desember-Januari-Februari pada WS Dumoga-Sangkub adalah berkurang sebesar (-0.5) – 0 Hari;
- Proyeksi Perubahan hari kering di bulan Juni-Juli-Agustus Pada WS Dumoga-Sangkub adalah bertambah sebesar 0-5 %
- Proyeksi perubahan hari hujan di bulan September-Oktober-November pada WS Dumoga-Sangkub adalah bertambah sebesar 0-5%

- Proyeksi perubahan *Consecutive Dry Days* di bulan Juni-Juli-Agustus pada WS Dumoga-Sangkub adalah bertambah sebesar 10-15%
- Proyeksi perubahan *Consecutive Wet Days* di bulan Desember-Januari-Februari pada WS Dumoga-Sangkub adalah bertambah 0-5 %
- Proyeksi perubahan suhu rata-rata tahunan pada WS Dumoga-Sangkub adalah naik sebesar 1,1-1,2 (derajat Celcius)
- Proyeksi perubahan suhu maksimum tahunan pada WS Dumoga-Sangkub adalah naik sebesar 2.9-3 (derajat Celcius)
- Proyeksi Perubahan Suhu minimum tahunan pada WS Dumoga-Sangkub adalah naik sebesar 2.7-2.8 (derajat Celcius)
- Proyeksi perubahan Jumlah hari hujan sangat lebat musiman pada bulan Desember-Januari-Februari pada WS Dumoga-Sangkub adalah berkurang sebesar (-0.5)-0 Hari
- Proyeksi perubahan jumlah hari hujan ekstrem musiman pada bulan Desember-Januari-Februari pada WS Dumoga-Sangkub adalah berkurang sebesar (-0.5)-0 Hari
- Proyeksi perubahan curah hujan harian maksimum pada bulan Desember-Januari-Februari WS Dumoga-Sangkub adalah berkurang sebesar (-5)-0 Milimeter
- Proyeksi Perubahan curah hujan kumulatif 5 harian maksimum pada bulan Desember-Januari-Februari pada WS Dumoga-Sangkub adalah berkurang (-10)-0 Milimeter
- Proyeksi perubahan awal musim hujan pada WS Dumoga-Sangkub adalah bertambah sekitar 1 Dasarian
- Proyeksi perubahan Panjang musim hujan pada WS Dumoga-Sangkub adalah bertambah sekitar 1 dasarian

Berdasarkan data dan informasi perubahan iklim dari BMKG maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan iklim di WS Dumoga Sangkub kearah kering walaupun persentasinya cukup kecil dengan rata-rata 5-10% dalam 30 (tiga puluh) tahun kedepan.

Adapun upaya yang sedang dilaksanakan di DAS yang berada pada WS. Dumoga-Sangkub antara lain adalah dengan melakukan adaptasi ketahanan infrastruktur sumber daya air terhadap perubahan iklim dan melakukan mitigasi melalui Gerakan Nasional Rehabitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).

d. Energi

Kebutuhan energi seperti energi listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi pembangkit listrik tenaga air masih terbatas. Pembangunan PLTA dengan membangun bendungan memerlukan biaya investasi yang sangat besar, sementara listrik mikro-hidro merupakan alternative lain yang sedang diusahakan secara intensif di wilayah Dumoga-Sangkub.

Menurut data PT. PLN (Persero) Wilayah SULUTGO, pada saat ini Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki rasio elektrifikasi 74,40% dengan pertumbuhan pelanggan listrik di Sulawesi Utara 10,5%. Beban listrik pada sistem kelistrikan SULUTGO saat ini rata-rata mencapai 325 MW sedangkan daya mampu pembangkit saat ini 395 MW atau ada kelebihan daya sekitar 70 MW. Cadangan daya ini akan ditambah dari masuknya pasokan listrik dari PLTG Gorontalo Peaker sebesar 100 MW, atau dengan kata lain sistem kelistrikan SULUTGO akan memiliki cadangan daya sekitar 170 MW yang terhubung dalam sistem interkoneksi transmisi 150 kilo Volt (kV).

Penyediaan energi listrik di Sulawesi utara sebagian besar dihasilkan dari PLTD, PLTG, PLTU dan tenaga surya. Sementara listrik tenaga air merupakan alternatif lain yang sedang diusahakan secara intensif di Indonesia. Pemanfaatan tenaga air yang sudah dilakukan di wilayah sungai Dumoga-Sangkub diantaranya PLTMH di desa Pomoman kec Poigar Kab Bolmong dengan daya 10 kW.(debit 120lt/dt, head 10m) di sungai bilobon dan PLTM Lobong (2 x 0,8 MW). Wilayah Sungai Dumoga-Sangkub memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air seperti: pemanfaatan debit air yang ditampung kedalam waduk (dalam bentuk PLTA) untuk menghasilkan sumber daya listrik dalam rencana pembangunan Bendungan Lolak sebesar 2,43 MW. Dan ada beberapa potensi lain untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro pada beberapa wilayah sungai di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.4.1.2 Isu Strategis Lokal

- a. Penambahan kenaikan tinggi muka air saat musim hujan dan penurunan debit air pada saat musim kemarau.

Terjadi perubahan tata guna lahan dan pertambahan lahan kritis di WS. Dumoga-Sangkub yang menyebabkan penambahan kenaikan tinggi muka air saat musim hujan yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow (DAS Dumoga),

Bolaang Mongondow Utara (DAS Sangkub), Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan serta penurunan debit air pada saat musim kemarau yang terjadi pada daerah irigasi kewenangan pusat yaitu daerah irigasi kosinggolan dan toraut. Perubahan lahan terjadi di beberapa wilayah termasuk di sekitar Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone (TNBNW). Menurut laporan yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia pada tahun 2019, luas Taman Nasional Bogani Nani Wartabone adalah sekitar 287.000 hektar, dan sekitar 15% dari luas tersebut mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan dan penambahan lahan kritis dengan besaran persentase luas lahan pada kategori sangat kritis adalah 1,59% dari luas WS. Dumoga-Sangkub dan kategori kritis sebesar 12,04%.

b. Pencemaran air akibat pembuangan limbah peternakan dan domestic

Terpantau di beberapa sungai yang berada di WS. Dumoga sangkub sudah masuk ke kategori cemar ringan.

c. Bahaya tanah/tebing longsor

Longsor yang terjadi di beberapa titik WS. Dumoga-Sangkub secara alami terjadi dikarenakan kelerengan tinggi dengan minimnya tutupan lahan di atasnya, luas daerah rawan longsor berdasarkan kategori gerakan tanah adalah sebesar 5,74% dari luas total WS Dumoga Sangkub dikategorikan gerakan tanah tinggi sebagian besar terdapat pada DAS sangkub, sedangkan untuk kategori menengah sebesar 43,64% dari luas total WS Dumoga Sangkub dan tersebar di DAS Andagile, DAS Ayong, DAS Bayabuta, DAS Biontong, DAS Bohabak, DAS Bolangitang, DAS Buyat, DAS Kaidipang, DAS Lombagin, DAS Maelang, DAS Mataindo, DAS Molobog, DAS Mopungu, DAS Motongkad, DAS Nuangan, DAS Nunuka, DAS Pinolosian, DAS Salango, DAS Saleo, DAS Sangkub, DAS Sapanae, DAS Togid, DAS Tolondadu, DAS Tombolik, DAS Tuntung dan DAS Unggunoi pada bagian hulu.

d. Deforestasi dan degradasi hutan dan lahan

- Kerusakan hutan dan sumber air baku menurun, masih tingginya luas lahan kritis, perubahan fungsi dan perubahan peruntukkan lahan.
- Aktifitas penambangan liar sering membuang bahan-bahan berbahaya ke sungai sehingga membuat air tercemar.

e. Krisis air

- Sering terjadi konflik air dan masalah pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Ollot, Daerah Irigasi Pontak

- Penurunan intensitas tanam dan penurunan kuantitas debit air kawasan Bendung Kosinggolan dan Bendung Toraut
- Bangunan suplesi rusak/ hampir roboh di Desa Poyowa Kecil Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu
- Permasalahan pengelolaan pintu air/ sadap serta terjadi genangan di saluran pembuang di Desa Tombolango Kab. Bolaang Mongondow Utara
- Pada daerah irigasi Sangkub: bangunan sekunder baru tidak stabil di Desa Sangkub; sawah belum stabil di Desa Sangkub dan Desa Bintauna; tidak terjangkau air irigasi di Desa Mokusato Kec. Sangkub; terjadi genangan di sawah akibat meluap saluran pembuangan di Desa Bintauna Panta dan Desa Kopi; belum dapat menerima air irigasi di Desa Mokusato Kec. Sangkub; air irigasi tidak maksimal pada bangunan sekunder baru di Desa Busisinggo; air irigasi tidak pernah tersentuh areal persawahan bangunan sekunder baru di Desa Sangkub 3

f. Banjir

- Terjadi banjir yang mengakibatkan rusaknya DAS dan intake air baku untuk keperluan air minum di Kec. Sangtombolang Kab. Bolaang Mongondow
- Abrasi sungai di sepanjang aliran sungai, dan meluapnya aliran Sungai Kuhanga dan Bolangitang, Sungai Bohabak Desa Bohabak, Sungai Pontak Desa Gihang, Sungai Binjeita Desa Binjeita, Sungai Bolangitang Desa Ollot Bersatu, Desa Inomunga dan Desa Binjeita
- Pada pabrik PT. Conch di Desa Solog, drainase yang mengarah ke pabrik sangat kecil sehingga daya tampung tidak cukup mengakibatkan persawahan tergenang air dan banjir dan tidak tersedia sistem drainase yang dilengkapi katup pada tanggul yang berada di dekat rumah pompa air baku

1.4.2 Isu Strategis WS Tondano-Sangihe-Talau-Miangas

1.4.2.1 Isu Strategis Nasional

a. Ketahanan Air

Program *Millennium Development Goals* (MDGs) untuk penyediaan air bersih dilanjutkan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menargetkan pemenuhan kebutuhan air bagi seluruh masyarakat pada tahun 2030. Pemerintah menetapkan sasaran 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak (program 100-0-100) pada tahun 2019.

Untuk mendukung target tersebut, PDAM mengembangkan potensi air bersih sebesar 4.970 ltr/dtk di seluruh kabupaten/kota dalam WS Tondano–Sangihe–Talaud–Miangas. Saat ini, tingkat pelayanan mencapai 79% atau 2.213,72 ltr/dtk dari kebutuhan eksisting 2.817 ltr/dtk. Pengembangan pemanfaatan potensi air perlu direalisasikan guna mencapai target SDGs.

Selain PDAM, penyediaan air bersih juga dapat melibatkan investasi swasta, seperti PT Air Manado yang melayani kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri di wilayah Manado dan sekitarnya.

Permasalahan utama penyediaan air terjadi di wilayah kepulauan dengan area tangkapan air terbatas, ketersediaan air permukaan yang rendah pada musim kering, serta lokasi permukiman di perbukitan yang menyulitkan distribusi secara gravitasi. Ke depan, kuantitas dan kontinuitas sumber air menjadi tantangan penting di WS Tondano–Sangihe–Talaud–Miangas, khususnya di wilayah kepulauan.

b. Ketahanan Pangan

Produksi padi di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas mencapai 251.359 Ton/Tahun (sensus pertanian BPS 2019). Dengan besaran produksi tersebut maka kontribusi pangan terhadap kebutuhan sendiri di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas hanya mencapai 85% dari total kebutuhan pangan yaitu sebesar 295.716 Ton/tahun, defisit pangan tersebut mendapat suplai dari WS Dumoga-Sangkub untuk mencapai 100% kebutuhan tanaman pangan, sedangkan dalam skala provinsi, produksi pangan di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas mempunyai kontribusi sebesar 58% terhadap kebutuhan Provinsi Sulawesi Utara serta untuk kebutuhan pangan nasional hanya menyumbang 0,76% dari total kebutuhan pangan nasional.

Luasan daerah irigasi di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas sebesar 19.492 Ha dan sudah tidak ada potensi pengembangan daerah irigasi lagi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pasokan pangan dari daerah lain. Untuk itu, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan dan mewujudkan ketahanan nasional.

c. Perubahan Iklim Global

Umumnya curah hujan di Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Kota Manado yang dikelola Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memiliki tren yang bernilai positif pada semua besaran intensitas hujannya. Untuk intensitas hujan 1-20 mm/hari memiliki nilai slope sebesar 0,156 yang berarti hujan dengan intensitas 1-20 mm/hari cenderung meningkat sebanyak 0,156 hari setiap tahunnya atau dalam 100 Tahun meningkat 15,6 hari, selanjutnya hujan dengan intensitas lebih besar dari 100 mm/hari memiliki nilai slope sebesar 0,017 mm/hari atau dalam 100 Tahun meningkat 1,7 hari.

Adapun kajian mengenai tren fraksi hujan lebat yang membandingkan curah hujan tertentu dengan hari hujannya di dapatkan untuk intensitas hujan di atas 100 mm/hari memiliki nilai slope sebesar 0,011 yang berarti hujan dengan intensitas 100 mm/hari cenderung meningkat sebesar 0,011% setiap tahunnya atau dalam 100 Tahun terjadi peningkatan 1,1%.

Mengacu pada informasi dari BMKG Tahun 2022 terlihat perubahan iklim terhadap tren curah hujan dan tren fraksi hujan di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas tidak begitu signifikan terhadap pengelolaan sumber daya air khususnya dalam pengendalian daya rusak air mengingat dalam 100 tahun hanya terjadi peningkatan 1,7 hari untuk tren curah hujan dan 1,1% untuk tren fraksi hujan lebat dengan acuan hujan dengan intensitas 100 mm/hari.

Data dan informasi tentang kajian perubahan iklim di ambil dari website resmi BMKG (www.bmkg.go.id) tentang perubahan iklim khususnya di daerah WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas yang diwakili oleh stasiun meteorologi Sam Ratulangi Manado dengan panjang data selama 35 (Tiga Puluh Lima) tahun dari Tahun 1981-2016.

d. Energi

Pengelolaan listrik pada WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas dilakukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo (Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo) yang mempunyai cakupan wilayah kerja pada 3 (tiga) Provinsi, dengan adanya satu kesatuan sistem tersebut maka ketersediaan energi listrik pada suatu wilayah tertentu di kelola secara merata pada Wilayah Suluttenggo. Untuk daerah kepulauan sendiri, sebagian besar menggunakan unit-

unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skala kecil.

Pada DAS Tondano terdapat 3 (tiga) PLTA secara bertingkat, masing-masing PLTA Tonsea Lama 14,38 Mega Watt (MW), PLTA Tanggari I 18,00 MW dan PLTA Tanggari II 19,00 MW. Disamping itu telah teridentifikasi potensi PLTA Sawangan (dengan membuat bendungan) sebesar 16 MW dan PLTA Kuwil sebesar 1,30 MW.

Sementara itu daya terpasang di Provinsi Sulawesi Utara saat ini \pm 245 MW sedangkan beban puncak yang harus dipikul sebesar 242 MW ini menunjukkan terdapat surplus (cadangan daya sebesar) 3 MW. Pembangunan bendungan di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Mianguas akan memberikan kontribusi terhadap cadangan daya dan kapasitas terpasang tenaga listrik dimana terdapat potensi-potensi pengembangan listrik tenaga air (PLTM maupun PLTA) yang mencapai sekitar 20 MW.

1.4.2.2 Isu Strategis Lokal

a. Zona Daratan

1. Degradasi Lingkungan Danau Tondano

Danau Tondano adalah salah satu dari 15 danau prioritas berdasarkan konferensi danau dunia ke 16 yang diselenggarakan di Bali pada November 2016 dan juga menjadi salah satu danau yang memenuhi kriteria sebagai danau prioritas Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional, danau Tondano menjadi danau prioritas nasional dengan kriteria memiliki nilai strategis ekonomi dan sosial budaya yang tinggi serta mengalami tekanan dan degradasi berupa pengurangan volume tampungan dan luasan danau, peningkatan sedimentasi yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat. Kondisi lingkungan Danau Tondano saat ini mengalami beberapa ancaman, antara lain sedimentasi yang mencapai 13,41 cm/Tahun dan pertumbuhan gulma (eceng gondok) yang telah menyebar seluas 383 Ha atau 8,95% dari luas Danau.

2. Banjir Kota Manado

Hampir di setiap Tahun terjadi banjir di Kota Manado karena luapan pada sungai-sungai yang melintas Kota Manado seperti sungai Tondano, sungai Tikala, sungai Sario, sungai Malalayang dan sungai Bailang. Pada dasarnya

banjir yang sering terjadi disebabkan oleh dimensi sungai yang sudah tidak bisa menampung aliran air disaat curah hujan tinggi. Pada Tahun 2014 terjadi banjir yang sangat besar yang menyebabkan 4.496 rumah rusak berat, 1.971 rumah rusak sedang dan 4.799 rumah rusak ringan. Disamping itu terdapat kawasan rawan banjir di Kota Tondano, Kecamatan Ratatotok (Minahasa Tenggara), Kecamatan Tahuna (Kepulauan Sangihe), Kecamatan Kolongan dan Kecamatan Melonguane (Kepulauan Talaud).

b. Zona Kepulauan

1. Abrasi Pantai

Saat ini pemerintah tengah mengembangkan Pulau Miangas dan Marore (sebagai pulau terdepan) menjadi basis pertahanan nasional, sementara kelestarian pulau tersebut terancam oleh abrasi pantai disekelilingnya yang sepanjang Tahun mengikis dan mengancam keberadaan pulau tersebut. Oleh karena itu diperlukan dukungan bidang sumber daya air dalam hal Pengaman pantai disekeliling Pulau Miangas tersebut.

Pada zona kepulauan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terdapat ancaman abrasi pantai terhadap pulau-pulau utama, seperti Pulau Sangihe, Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, Pulau Nenusu, Pulau Miangas, Pulau Siau dan pulau lainnya. Begitu juga terhadap pantai selatan di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan kumpulan hasil studi teridentifikasi pantai kritis kurang lebih sepanjang 39 (tiga puluh sembilan) Km. Untuk itu diperlukan program pengamanan pantai berkelanjutan di berbagai lokasi tersebut.

2. Penyediaan Air Bersih

Terdapat masalah penyediaan air bersih di pulau-pulau perbatasan (Pulau Miangas, Kepulauan Nenusu, Kepulauan Marore, Kepulauan Kendahe dan Kepulauan Nusa Tabukan) dan pulau-pulau kecil lain, memerlukan perhatian khusus dalam rangka penyediaan air bersih di pulau-pulau tersebut.

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan dalam Laporan Kinerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I tahun 2025 disusun secara terstruktur untuk memberikan alur pembahasan yang jelas dan konsisten. Setiap bab dan subbab dirangkaikan secara logis agar keseluruhan isi laporan mudah dipahami. Penjelasan ringkas mengenai susunan laporan ini dapat dilihat sebagai berikut.

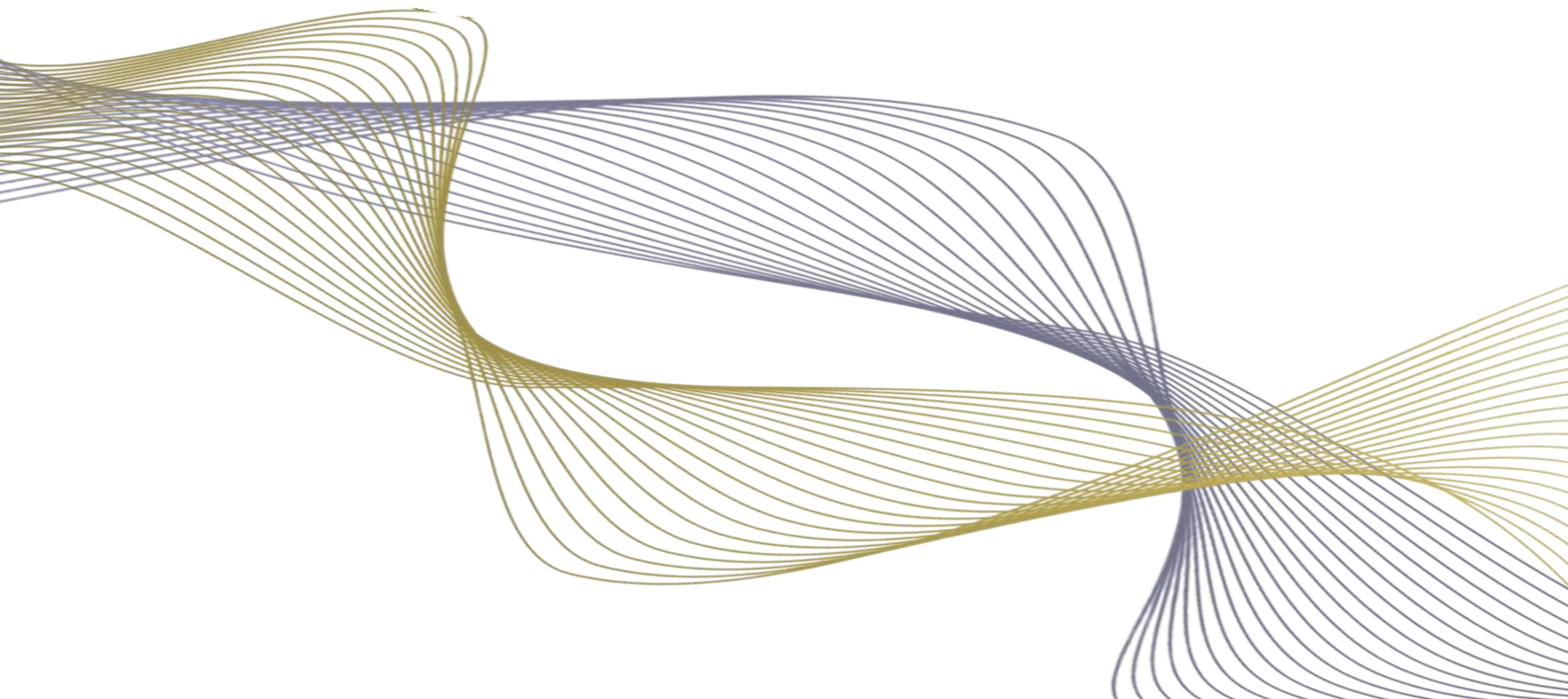
- **BAB I Pendahuluan:** berisi gambaran umum mengenai kondisi dan dasar penyusunan laporan. Subbab **Latar Belakang** menjelaskan konteks serta urgensi pelaporan kinerja, sedangkan **Tugas dan Fungsi** merinci mandat organisasi. **Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia** menjabarkan komposisi kelembagaan serta kapasitas personel. **Sarana dan Prasarana** menguraikan dukungan fasilitas yang dimiliki. **Isu Strategis** mengidentifikasi tantangan utama yang memengaruhi pelaksanaan tugas, dan **Sistematika Laporan** menjelaskan alur penyajian keseluruhan dokumen.
- **BAB II Perencanaan Kinerja:** menguraikan landasan perencanaan kinerja yang digunakan dalam tahun pelaporan. **Renstra** menggambarkan arah strategis jangka menengah organisasi, sedangkan **Perjanjian Kinerja** merinci komitmen tahunan yang disepakati. **Metode Pengukuran** menjelaskan pendekatan pemantauan kinerja yang digunakan, dan **Target Kinerja Tahun Berjalan** memuat sasaran spesifik yang hendak dicapai dalam rangka mendukung target Renstra.
- **BAB III Akuntabilitas Kinerja:** berisi penilaian atas capaian kinerja tahun 2025. **Upaya Peningkatan Akuntabilitas** mendeskripsikan langkah yang dilakukan untuk memperkuat tata kelola kinerja. **Capaian Kinerja** menyajikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan. **Analisis Perbandingan Kinerja** membandingkan capaian dengan tahun sebelumnya atau target yang telah ditetapkan. **Analisis Realisasi Anggaran** mengevaluasi hubungan antara penggunaan anggaran dan keluaran yang dihasilkan, serta **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya** menilai tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi.
- **BAB IV Penutup:** memuat **Simpulan Umum** mengenai keseluruhan kinerja tahun berjalan, disertai **Rekomendasi dan Tindak Lanjut** yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

- **Lampiran:** menyajikan dokumen pendukung yang memperkuat laporan utama, antara lain Perjanjian Kinerja, Penghargaan (jika ada), Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan selama tahun pelaporan.



BAB II Perencanaan Kinerja

Laporan Akhir – Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
2025



2.1 Uraian Singkat Renstra

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan dokumen perencanaan menjadi tahap awal yang krusial untuk menjawab dinamika lingkungan strategis di tingkat lokal, nasional, maupun global, sambil tetap berlandaskan pada Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SAKIP). Melalui pendekatan perencanaan strategis yang terarah dan terpadu, instansi pemerintah dapat menyesuaikan visi dan misinya dengan berbagai potensi, peluang, serta tantangan yang dihadapi guna meningkatkan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan dokumen perencanaan mencerminkan suatu proses yang berfokus pada pencapaian hasil dalam jangka waktu satu hingga lima tahun, disusun secara sistematis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun yang berpotensi muncul. Proses tersebut menghasilkan rencana strategis yang memuat visi, misi, serta tujuan organisasi secara menyeluruh.

2.1.1 Internalisasi Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, visi pembangunan jangka menengah nasional yang didasarkan atas integrasi RPJPN 2025-2045 dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini menegaskan semangat kolaboratif bangsa dalam mewujudkan transformasi Indonesia menuju negara maju. Selaras dengan hal tersebut, sebagai wujud kontribusi terhadap pencapaian visi nasional, Visi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan akses infrastruktur keciptakarya yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
5. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
6. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
7. Mewujudkan infrastruktur PU perkotaan yang berkelanjutan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan 7 (tujuh) tujuan pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan air nasional;
2. Memperkuat kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
3. Memperkuat akses infrastruktur keciptakarya yang andal dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas;
5. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
6. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih dan terpercaya; dan
7. Terwujudnya infrastruktur PU di perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga mempunyai Sasaran Strategis yang merupakan kondisi nyata yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai wujud kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sasaran ini berperan sebagai ukuran dampak (*outcome*) dari intervensi penyelenggaraan infrastruktur, serta menjadi representasi atas

kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dalam memenuhi mandat pembangunan nasional. Berikut adalah penyalarsan antara tujuan dan SS Kementerian PU.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

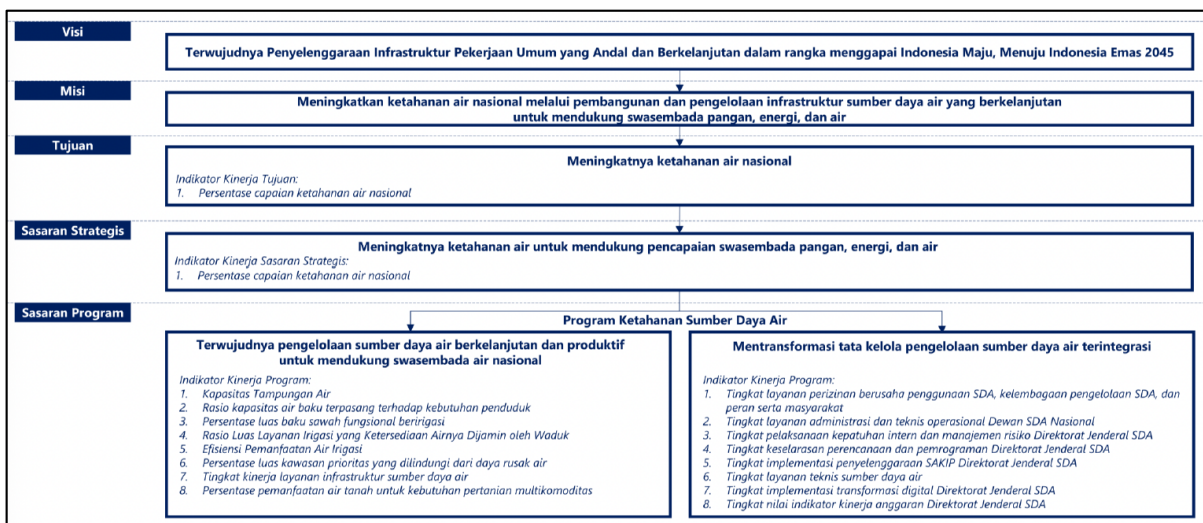
Tujuan	Kode Sasaran Strategis	Sasaran Strategis
Meningkatnya ketahanan air nasional	SS-01	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air
Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan	SS-02	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan
Menguatnya akses infrastruktur keciptakaryaan yang andal dan berkelanjutan	SS-03	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan
Meningkatnya kontribusi pemenuhan ketersediaan prasarana yang mendukung Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan yang andal dan berkualitas	SS-04	Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas
Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi	SS-05	Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional
Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya	SS-06	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan tugas teknis lainnya

Tujuan	Kode Sasaran Strategis	Sasaran Strategis
Mewujudkan infrastruktur PU di perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan	SS-07	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur Perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum, dihasilkan *cascading* struktur kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dalam mencapai pembangunan nasional yang tercantum di RPJMN 2025-2029. Dalam *cascading* ini, dijelaskan bagaimana program yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum berkontribusi dalam pencapaian visinya.

Sebagai salah satu bagian dalam struktur organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendukung pencapaian misi Kementerian Pekerjaan Umum yang ke-1, yaitu “Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air” dengan rincian *cascading* yang dapat dilihat pada gambar berikut,



Gambar 2.1 *Cascading* Kinerja Program Ketahanan Sumber Daya Air (DJSDA)

Dalam konteks *cascading* kinerja program ketahanan sumber daya air yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, setiap sasaran dan indikator

kinerja di tingkat pusat perlu dijabarkan secara terukur hingga ke unit pelaksana teknis di daerah. Proses ini memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sumber daya air dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan operasional yang relevan dengan kondisi wilayah. Dengan demikian, keterpaduan antara kebijakan nasional, rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum, dan pelaksanaan di tingkat UPT dapat terwujud secara sinergis.

Secara garis besar kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- Pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya;
- Pengembangan jaringan air tanah dan air baku;
- Pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai;
- Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA serta penanggulangan darurat akibat bencana;
- Pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi;
- Kepatuhan internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- Perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi;
- Layanan teknis Sumber Daya Air; dan
- Dukungan manajemen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Perumusan usulan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi I berpedoman pada Rencana Strategis Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Tahun Anggaran 2025–2029. Dokumen Renstra tersebut telah terintegrasi dalam sistem *e-Programming*, yaitu sistem pemrograman yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai acuan perencanaan dan penganggaran program.

Namun demikian terdapat tambahan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I. Faktor yang berpengaruh antara lain bencana alam, upaya mendukung program dari pemerintah provinsi Sulawesi Utara, dan lain – lain. Untuk itu Balai Wilayah Sungai Sulawesi I melakukan pembaharuan terhadap Renstra dengan tetap mengacu kepada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya di uraikan sebagai sub-sub kegiatan sebagai berikut:

1. *Hydrology Specialist Individual Consultant dan Data Update for Rationalization Study* dan Penyusunan dokumen kesiapan air baku Langowan;
2. *Flood Risk Management and Engineering Service Consultant* for Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.

Dalam melaksanakan kegiatan dan program tersebut, terdapat satuan kerja yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I sebagai unit penyelenggara, antara lain:

1. Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, dengan 3 (tiga) PPK:
 - PPK Ketatalaksanaan
 - PPK Perencanaan dan Program
 - PPK Penatagunaan Sumber Daya Air
2. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara, dengan 3 (tiga) PPK:
 - PPK Sungai dan Pantai I
 - PPK Sungai dan Pantai II
 - PPK Sungai dan Pantai III
3. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara, dengan 3 (tiga) PPK:
 - PPK Air Tanah dan Air Baku I
 - PPK Air Tanah dan Air Baku II
 - PPK Irigasi dan Rawa
4. SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi I, dengan 5 (lima) PPK:
 - PPK Perencanaan Bendungan
 - PPK Pembangunan Bendungan I
 - PPK Danau, Situ dan Embung
 - PPK Pengadaan Tanah I
 - PPK Pengadaan Tanah II
5. Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi I, dengan 3 (tiga) PPK:
 - PPK Operasi dan Pemeliharaan I
 - PPK Operasi dan Pemeliharaan II
 - PPK Operasi dan Pemeliharaan III

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan organisasi sekaligus dasar evaluasi akuntabilitas pada akhir tahun anggaran. Penyusunannya dimaksudkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengevaluasi pencapaian maupun kendala pelaksanaan kegiatan berdasarkan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi. Setiap indikator kinerja dianalisis untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai target, termasuk keterkaitannya dengan program dan kebijakan dalam Rencana Strategis.

Sebagai dasar pengukuran kinerja, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dan memuat target-target yang harus dicapai selama tahun berjalan. Target inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan atau ketidaktercapaian kinerja. Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I di tahun anggaran 2025.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I MANADO
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SUGENG HARIANTO
Jabatan : Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI PURWANTORO
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DWI PURWANTORO

SUGENG HARIANTO

Generated by MONIKA SDA KEMENTERIAN PU 02025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I MANADO
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**




Lampiran 1

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	
SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	
Kapasitas tampungan air	58,99 m ³ /kapita
Efisiensi pemanfaatan air irigasi	0,322 USD/m ³
Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	0,06 %
Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	57,74 %
Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	4,13 %
Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	0,16 %
SASARAN PROGRAM: Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	
Tingkat Kepatuhan Intern UPT	83,90 %
Tingkat Pelaksanaan Program Dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	53,57 %
Tingkat Penyelenggaraan SAKIP Pada Entitas di B/BWS	100,00 %
Tingkat implementasi transformasi digital UPT	15,13 Nilai

Generated by MONIKA SDA KEMENTERIAN PU 02025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I MANADO
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR



Lampiran 1

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	96,72 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Ketahanan Sumber Daya Air	Rp. 556.458.913.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.501.575.000,00
	Rp. 570.960.488.000,00

Direktur Jenderal Sumber Daya Air

DWI PURWANTORO

Jakarta, 29 Desember 2025
Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
Manado

SUGENG HARIANTO

Generated by MCHWA-GDA-KEMENTERIAN PU 02026

Gambar 2.2 Sertifikat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BWS Sulawesi I

2.3 Metode Pengukuran

Sasaran program adalah tujuan yang ingin diraih dari pelaksanaan suatu program untuk membantu mencapai sasaran strategis di tingkat Kementerian atau Lembaga. Sasaran ini menjelaskan manfaat yang akan dirasakan oleh penerima manfaat dalam jangka menengah, sebagai hasil lanjutan dari keluaran kegiatan yang sudah dilakukan. Dengan kata lain, Sasaran Program menggambarkan perubahan atau dampak yang diharapkan terjadi setelah *output* dimanfaatkan. Sasaran ini berada pada level Direktorat Jenderal dan menjadi acuan penting dalam melihat apakah sebuah program benar-benar memberi manfaat sesuai yang direncanakan.

Sasaran Program (SP) Balai Wilayah Sungai Sulawesi I terhadap sasaran Direktorat Jenderal SDA 2025-2029 adalah:

1. Sasaran Program Teknis: Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional. Pencapaian Sasaran Program ini dapat dilihat dari 6 (enam) indikator, yaitu:
 - Kapasitas tampungan air;
 - Efisiensi pemanfaatan air irigasi;
 - Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air;
 - Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air;
 - Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas; dan
 - Persentase kondisi keandalan daerah irigasi.
2. Sasaran Program Teknis: Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi. Diukur lewat 4 (empat) indikator, yaitu:
 - Tingkat kepatuhan intern Unit Pelaksana Teknis;
 - Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
 - Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada entitas di BBWS/BWS; dan
 - Tingkat implementasi transformasi digital BBWS/BWS.
3. Sasaran Program Generik: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Pencapaian Sasaran Program ini merupakan bagian dari kinerja bersama seluruh organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

Pencapaian kinerja ini diukur dengan indikator: Tingkat kualitas dukungan manajemen Unit Pelaksana Teknis.

Cara pengukuran masing-masing Sasaran Program beserta indikatornya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2 Cara Pengukuran Sasaran BWS Sulawesi I

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja/Satuan	Jenis Indikator	Satuan	Tipe Perhitungan
SP	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	Jumlah kapasitas tampungan air	Non-Komposit	m ³ /kapita	Tahunan
		Nilai efisiensi pemanfaatan air irigasi	Non-Komposit	USD/m ³	Tahunan
		Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	Non-Komposit	%	Tahunan
		Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	Komposit	%	Tahunan
		Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	Non-Komposit	%	Kumulatif
		Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	Non-Komposit	%	Kumulatif
SP	Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern Unit Pelaksana Teknis	Komposit	%	Tahunan

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja/Satuan	Jenis Indikator	Satuan	Tipe Perhitungan
		Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	Non-Komposit	%	Tahunan
		Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada entitas di BBWS/BWS	Non-Komposit	%	Tahunan
		Tingkat implementasi transformasi digital BBWS/BWS	Non-Komposit	Nilai	Tahunan
SP	Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	Komposit	%	Tahunan

2.4 Target Tahun 2025 menurut Rencana Strategis

Target Tahun 2025 disusun untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan selaras dengan arah pembangunan dalam Rencana Strategis. Target ini menjadi pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja sepanjang tahun. Sejalan dengan itu, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I juga menetapkan target kinerja yang mengacu pada Renstra, sehingga seluruh kegiatan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan sumber daya air di wilayah kewenangannya. Berikut adalah target yang ditetapkan untuk Tahun 2025.

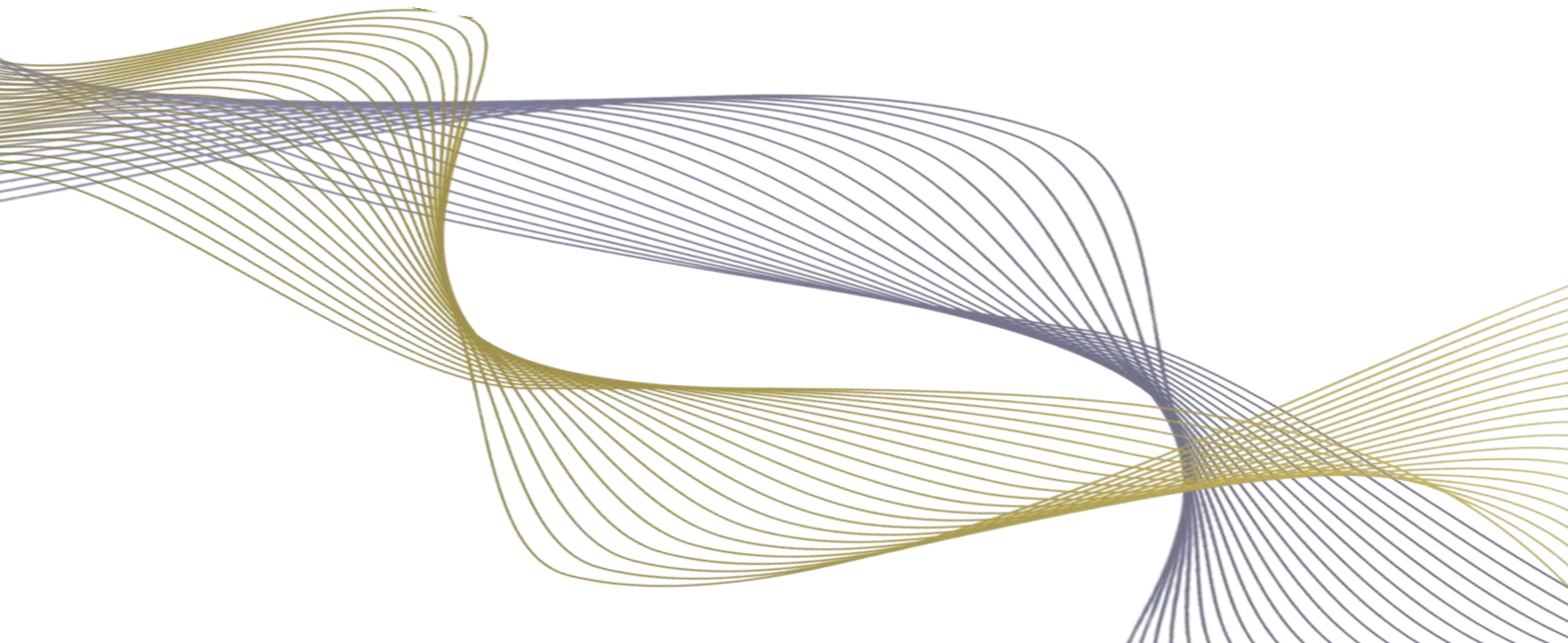
Tabel 2.3 Target BWS Sulawesi I t.a. 2025 mengacu Renstra 2025-2029

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target Renstra 2025-2029
SP	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional		
1	Jumlah kapasitas tampungan air	m ³ /kapita	59,31
2	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m ³	0,34
3	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	12
4	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	%	
5	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	%	
6	Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	%	
SP	Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi		
1	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern Unit Pelaksana teknis	%	
2	Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%	
3	Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada entitas di BBWS/BWS	%	
4	Tingkat implementasi transformasi digital UPT	Nilai	
SP	Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen Unit Pelaksana Teknis	%	100



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Laporan Akhir – Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
2025



3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I berupaya memperkuat akuntabilitas kinerja melalui perbaikan pada aspek pelaporan, khususnya terkait penyajian informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Pada evaluasi sebelumnya, ditemukan bahwa penjelasan mengenai keterkaitan antara input, proses, dan output belum disampaikan secara memadai sehingga belum sepenuhnya menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Menanggapi hal tersebut, pada penyusunan Laporan Kinerja tahun ini telah dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan pembahasan khusus mengenai efisiensi pada Subbab 3.5, yang memuat analisis lebih terstruktur terkait pemanfaatan anggaran, efektivitas penggunaan sumber daya manusia, serta optimalisasi waktu pelaksanaan kegiatan. Penambahan subbab ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, baik dari sisi capaian output maupun alokasi sumber daya yang digunakan.

3.2 Capaian Kinerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana Balai Wilayah Sungai Sulawesi I mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat tingkat keberhasilan maupun kekurangannya selama Tahun Anggaran 2025. Proses penilaian ini berpedoman pada Sasaran Program yang telah disetujui oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I. Dalam kesepakatan tersebut, ditetapkan 10 (sepuluh) indikator sasaran program teknis dan 1 (satu) indikator sasaran program generik yang menjadi acuan utama evaluasi, antara lain:

Teknis

- a. Jumlah kapasitas tampungan air;
- b. Efisiensi pemanfaatan air irigasi;
- c. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air;
- d. Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air;
- e. Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas;
- f. Persentase komoditas keandalan daerah irigasi;
- g. Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern Unit Pelaksana Teknis;

- h. Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- i. Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada entitas di BBWS/BWS; dan
- j. Tingkat implementasi transformasi digital BBWS/BWS.

Generik

- a. Tingkat kualitas dukungan manajemen Unit Pelaksana Teknis.

Tabel 3.1 Sasaran Program BWS Sulawesi I

Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	Jumlah kapasitas tampungan air. (58.99 m ³ /kapita)	7693 – Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya.	Meningkatnya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan : 1. Jumlah dukungan teknis bidang bendungan dan danau (3 Dokumen)
Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	Efisiensi pemanfaatan air irigasi. (0.32 USD/m ³)	7691 – Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	Meningkatnya pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi : 1. Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (5162 Ha) 2. Jumlah dukungan teknis bidang irigasi dan rawa (1 Dokumen)

Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
<p>Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional</p>	<p>Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air. (0.06%)</p>	<p>7692 – Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai</p>	<p>Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air (18 Ha) 2. Jumlah dukungan teknis teknis bidang sungai dan pantai (5 Dokumen)
<p>Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional</p>	<p>Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air. (57.74%)</p>	<p>7695 – Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana</p>	<p>Terjaganya layanan infrastruktur sda dalam rangka meningkatkan dan menjaga kapasitas tampungan air, pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta untuk ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola (26 Unit) 2. Jumlah unit pengelola yang

Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
			<p>dibentuk/dioperasikan (3 Unit)</p> <p>3. Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola (1.333 m³/detik)</p> <p>4. Luas layanan irigasi yang dikelola (7412 Ha)</p> <p>5. Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam padat karya (2280 Orang Kerja)</p> <p>6. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas sungai (1.72 Miliar m³)</p> <p>7. Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola (13 Unit)</p> <p>8. Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasikan dan dipelihara (0.34 Km)</p> <p>9. Jumlah sungai yang dipelihara (16 Sungai)</p>

Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
			<p>10. Jumlah layanan penanganan darurat akibat bencana (1 Jumlah Layanan)</p> <p>Meningkatnya tata kelola operasi dan pemeliharaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Rekomendasi Teknis yang disusun (4 Rekomendasi) 2. Jumlah dokumen perhitungan indeks <i>river basin organization performance benchmarking</i> (1 Dokumen) 3. Jumlah kelompok masyarakat dengan penguatan kelembagaan yang difasilitasi (3 Kelompok Masyarakat) 4. Jumlah wadah koordinasi pengelolaan SDA wilayah sungai kewenangan pusat yang difasilitasi (2 Wadah Koordinasi)

Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
			5. Jumlah dokumen alokasi air yang disusun (2 Dokumen)
Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas . (4.13%)	7694 – Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	Meningkatnya pasokan air baku berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air baku : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang dibangun (0.18 m³/detik) 2. Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang direhabilitasi (0.8 m³/detik) 3. Jumlah dukungan teknis bidang air tanah dan air baku (1 Dokumen)

Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	Persentase kondisi keandalan daerah irigasi. (0.16%)	7691 – Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	Meningkatnya pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (5162 Ha) 2. Jumlah dukungan teknis bidang irigasi dan rawa (1 Dokumen)
Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern Unit Pelaksana Teknis. (83.90%)	7689 – Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Meningkatnya maturitas Kepatuhan Intern : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kepatuhan Intern Satuan Kerja (82%)
Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA. (53.57%)	7688 – Perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	Mentransformasi tata kelola sistem dan strategi pengelolaan SDA : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat implementasi RPSDA WS Kewenangan Pusat (50%) 2. Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di

Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
			<p>Direktorat Jenderal SDA (83.32%)</p> <p>3. Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada entitas di BBWS/BWS (87,56%)</p> <p>4. Tingkat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada BBWS/BWS (100%)</p>
Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada entitas di BBWS/BWS. (100%)	7688 – Perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	<p>Mentransformasi tata kelola sistem dan strategi pengelolaan SDA :</p> <p>1. Tingkat implementasi RPSDA WS Kewenangan Pusat (50%)</p> <p>2. Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA (83.32%)</p> <p>3. Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada entitas di BBWS/BWS (87,56%)</p> <p>4. Tingkat pelaksanaan pemantauan dan</p>

Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
			evaluasi pada BBWS/BWS (100%)
Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	Tingkat implementasi transformasi digital UPT. (15.13 Nilai)	7690 – Layanan Teknis Sumber Daya Air	<p>Meningkatnya kesiapan teknis dalam rangka meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat layanan sistem informasi untuk sumber daya air (SISDA) Direktorat Jenderal SDA dan layanan hidrologi untuk SIH3 (100%) 2. Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air (2 Wilayah Sungai) 3. Jumlah dokumen perhitungan nilai indeks ketahanan air wilayah sungai (IKtA-WS) (2 Dokumen)

Sasaran Program	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
			4. Tingkat kesiapan teknis (100%)
Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	Tingkat kualitas dukungan manajemen Unit Pelaksana Teknis. (96.72%)	7755 – Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kualitas dukungan manajemen satuan kerja (100%) 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Unit Pelaksana Satuan Kerja BBWS/BWS (100%)

3.2.1 Analisis Penyebab Kegagalan dan Keberhasilan serta Solusi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I pada Tahun Anggaran 2025, terlihat bahwa realisasi program dipengaruhi oleh sejumlah kondisi yang berperan dalam mendukung keberhasilan maupun menjadi kendala pencapaian target. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.

3.2.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

a. Faktor Eksternal

- Terjalinnnya koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Kementerian dan Lembaga terkait, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program;

- Pelaksanaan proses pengadaan pekerjaan yang lebih efisien melalui lelang daring dan lelang dini, sehingga jadwal kegiatan dapat dimulai lebih cepat;
- Dukungan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berpotensi terdampak, sehingga pelaksanaan fisik di lapangan dapat berjalan kondusif;
- Tersedianya dukungan teknis dari instansi terkait, seperti penyediaan data dasar, peta, atau dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk mempercepat proses persiapan pekerjaan; dan
- Adanya bantuan fasilitasi di lapangan dari pemerintah setempat, seperti aksesibilitas lokasi pekerjaan, pengamanan area kerja, atau dukungan koordinasi dengan perangkat desa/kelurahan.

b. Faktor Internal

- Ketersediaan SDM yang cukup serta memiliki kompetensi sesuai bidangnya, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung lebih efektif dan tidak membebani tim pelaksana;
- Kondisi sarana dan prasarana milik balai yang semakin memadai, sehingga mendukung kelancaran koordinasi dan administrasi pekerjaan;
- Tersiapkannya dokumen dasar sebelum pekerjaan dimulai—antara lain SID, DED, AMDA, serta dokumen pendukung lainnya—yang mempercepat proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- Pelaksanaan pengawasan secara berkala yang memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana, standar teknis, dan jadwal yang telah ditetapkan; dan
- Adanya sistem pelaporan dan pemantauan internal yang lebih tertata, sehingga progres kegiatan dapat dipantau secara *real time* dan setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti.

3.2.1.2 Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Target

Ketidaktercapaian yang dimaksud bukan merupakan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan, melainkan terkait dengan penyerapan anggaran dan progress fisik yang belum mencapai 100%. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

- Waktu pelaksanaan pengadaan yang cukup panjang menyebabkan sebagian anggaran swakelola tidak dapat terserap secara optimal;

- Masalah pertanahan dan pengadaan lahan di lokasi pekerjaan menjadi salah satu kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat paket pekerjaan yang baru dapat dimulai pada akhir tahun anggaran, sehingga penyelesaiannya harus dilanjutkan pada tahun berikutnya (masuk ke RPATA);
- Upaya efisiensi anggaran mengakibatkan beberapa paket pekerjaan harus diblokir serta sebagian alokasi anggaran ditahan, sehingga tidak seluruh kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana awal; dan
- Terdapat beberapa kendala terkait pengiriman material dan alat kerja khususnya di daerah yang sulit dijangkau seperti kepulauan, sehingga mempengaruhi jadwal pekerjaan di lapangan.

3.2.3 Analisis Kegiatan penunjang Kegagalan/Keberhasilan

Dalam rangka memastikan terlaksananya tugas dan target kinerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, berbagai langkah strategis telah ditempuh sebagai bentuk peningkatan kualitas pelaksanaan program. Upaya-upaya tersebut meliputi:

- Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan diklat bagi PNS maupun Non-PNS untuk memperkuat kemampuan teknis dan manajerial dalam mendukung pelaksanaan tugas;
- Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan operasional, administrasi, dan pengawasan di lingkungan balai;
- Pengembangan dan penguatan Zona Integritas untuk meningkatkan transparansi, mencegah gratifikasi, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik;
- Penerapan Manajemen Risiko sebagai langkah antisipatif dalam mengidentifikasi dan memitigasi hambatan yang berpotensi mengganggu kelancaran pekerjaan;
- Pemanfaatan sistem informasi dan media daring untuk mempermudah proses monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja, serta koordinasi lintas bidang;
- Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan agar isu lahan, akses lokasi, dan dukungan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan efektif;

- Optimalisasi proses pengadaan, termasuk penerapan lelang dini dan pengawasan pengadaan, agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai lebih awal dan tepat waktu;
- Pelaksanaan pengawasan lapangan secara rutin untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai standar teknis, jadwal, dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Kesiapan dokumen perencanaan teknis yang lengkap, seperti SID, DED, dan dokumen pendukung lainnya, untuk mengurangi revisi desain dan memperlancar pelaksanaan; dan
- Pengelolaan anggaran yang efisien dan terarah, termasuk penyesuaian alokasi, evaluasi kebutuhan prioritas, serta pemblokiran atau penahanan anggaran pada paket tertentu untuk menjaga efektivitas serapan dan capaian kinerja.

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Beberapa Tahun Terakhir

Target kinerja pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025 mengalami perubahan, dimana sejumlah sasaran program yang muncul pada tahun 2024 tidak lagi tercantum di tahun 2025, dan ada pula yang justru muncul kembali setelah terakhir dilaksanakan di tahun 2023. Perbandingan capaian kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja T.A. 2024 dan 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian
SP	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional					
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	0.0695	104.32	-	-

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian
2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	Ha	16.1	113.98	-	-
3	Jumlah kapasitas tampungan air	m ³ /kapita	-	-	58.99	58.99
4	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m ³	-	-	0.322	0.322
5	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	Ha	189,54	100	-	-
6	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	-	-	0.06	0.06
7	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	%	-	-	4.13	4.13
8	Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	%	-	-	0.16	0.16

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian
9	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	%	68,28	100	57.74	57.74
10	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern Unit Pelaksana Teknis	%	-	-	83.90	83.90
11	Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%	-	-	53.57	56.26
12	Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada entitas di BBWS/BWS	%	-	-	100	100
13	Tingkat implementasi transformasi digital UPT	Nilai	-	-	15.13	15.13
SP	Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen Unit Pelaksana Teknis	%	100	100	96.72	96.72

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2024 dan 2025, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator pada sektor sumber daya air menunjukkan capaian yang cukup baik dan stabil. Pada tahun 2024 beberapa indikator bahkan melampaui target, seperti penurunan luas kawasan terdampak banjir serta luas daerah irigasi yang direhabilitasi. Sementara pada tahun 2025, sebagian besar indikator menunjukkan konsistensi antara target dan capaian, misalnya kapasitas tampungan air, efisiensi pemanfaatan air irigasi, persentase kawasan prioritas yang dilindungi, serta pemanfaatan air tanah untuk pertanian. Stabilitas capaian ini menunjukkan adanya perencanaan dan pengelolaan kinerja yang terukur serta implementasi kegiatan yang berjalan sesuai rencana.

Pada aspek manajemen dan penyelenggaraan unit pelaksana teknis, capaian kinerja juga menunjukkan tren positif. Indikator seperti tingkat kepatuhan internal, penyelenggaraan SAKIP, pelaksanaan program dan anggaran, serta implementasi transformasi digital UPT menunjukkan realisasi yang sejalan dengan target yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dukungan manajemen UPT mencapai nilai maksimal baik di tahun 2024 maupun 2025. Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa baik kinerja teknis maupun manajerial di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I telah berjalan efektif, dengan capaian yang konsisten dan mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Penyusunan target jangka menengah (Renstra) merupakan proses penetapan sasaran ideal yang ingin dicapai, dengan asumsi dukungan output yang optimal serta ketersediaan anggaran yang memadai. Sementara itu, alokasi anggaran yang digunakan dalam tahun berjalan adalah anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui kementerian terkait. Oleh karena itu, sering kali terdapat perbedaan antara target dalam Renstra dan realisasi kinerja berdasarkan pagu anggaran tahun berjalan. Perbedaan ini dapat menjadi dasar evaluasi serta bahan penyusunan target pada periode berikutnya. Tabel berikut menyajikan perbandingan target Renstra dengan realisasi kinerja tahun anggaran 2025.

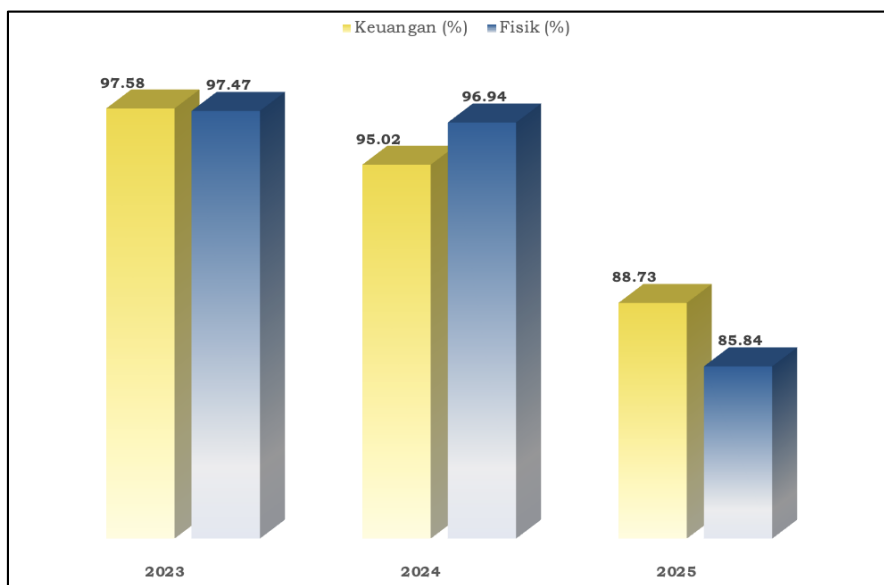
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja T.A. 2025 dengan Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Renstra Target	Realisasi T.A. 2025
SP	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional			
1	Jumlah kapasitas tampungan air	m ³ /kapita	59,31	58.99
2	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m ³	0,34	0.322
3	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	12	0.06
4	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	%		57.74
5	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	%		4.13
6	Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	%		0.16
SP	Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi			
1	Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern Unit Pelaksana teknis	%		83.90
2	Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%		56.26
3	Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada entitas di BBWS/BWS	%		100
4	Tingkat implementasi transformasi digital UPT	Nilai		15.13
SP	Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya			
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen Unit Pelaksana Teknis	%	100	96.72

3.3.3 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun ini dengan Tahun Lalu

Tabel 3.4 Perbandingan Penyerapan Anggaran T.A. 2023 - 2025

Tahun	Pagu		Realisasi		Keuangan (%)	Fisik (%)
2025	Rp	564.414.860.000	Rp	500.800.198.000	88,73	85,84
2024	Rp	479.665.340.000	Rp	455.799.428.000	95,02	96,94
2023	Rp	681.341.032.000	Rp	664.846.568.000	97,58	97,47



Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi Penyerapan T.A. 2023 – 2025

Berdasarkan data perbandingan penyerapan anggaran tahun 2023–2025, terlihat bahwa tren penyerapan anggaran baik dari sisi keuangan maupun fisik mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, kinerja penyerapan anggaran berada pada tingkat yang sangat tinggi, yaitu 97,58% untuk keuangan dan 97,47% untuk fisik. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan, capaian masih dalam kategori sangat baik, yaitu 95,02% untuk keuangan dan 96,94% untuk fisik. Namun, pada tahun 2025 penyerapan anggaran menurun cukup signifikan menjadi 88,73% untuk keuangan dan 85,84% untuk fisik, meskipun realisasi anggaran tetap tinggi secara nominal.

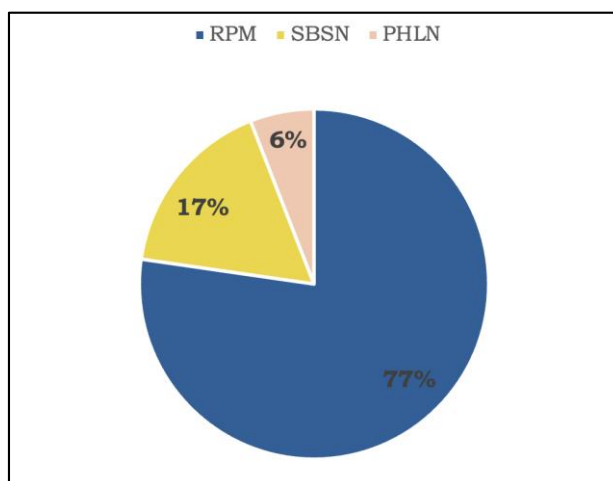
Grafik perbandingan juga menunjukkan pola penurunan bertahap, di mana capaian tahun 2023 menjadi yang tertinggi, diikuti 2024 yang masih stabil, dan 2025 yang menunjukkan penurunan paling besar. Penurunan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada tahun 2025, seperti keterlambatan pelaksanaan, dinamika perencanaan, atau kendala teknis di lapangan. Secara keseluruhan, meskipun penyerapan tetap berada pada tingkat yang cukup baik, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk meningkatkan kembali kinerja penyerapan pada tahun-tahun berikutnya.

3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional

Realisasi kinerja balai diukur melalui persentase penyerapan anggaran pada tahun berjalan. Untuk melihat posisi kinerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dalam konteks yang lebih luas, capaian tersebut juga dibandingkan dengan kinerja balai-balai lain di tingkat nasional. Perbandingan ini disajikan secara ringkas dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja di Level Nasional

No	Balai	Pagu (Rp) (000)				Realisasi (Rp) (000)				Progres (%)	
		RPM	SBSN	PHLN	Total	RPM	SBSN	PHLN	Total	Keu	Fis
1	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	524.193.001	113.961.436	40.221.859	564.414.860	386.250.608	113.796.614	752.976	500.800.198	88,73	85,84
2	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	896.537.838	0	51.518.830	948.056.668	772.582.865	0	26.035.649	798.618.514	84,24	84,58



Gambar 3.2 Persentase Sumber Dana BWS Sulawesi I T.A. 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I memperoleh pagu total sebesar Rp 564.414.860.000, yang bersumber dari tiga jenis pendanaan. Dana Rupiah Murni (RPM) menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp 524.193.001.000, disusul oleh pendanaan SBSN sebesar Rp 113.961.436.000, dan PHLN sebesar Rp 40.221.859.000. Berdasarkan grafik komposisi sumber dana, RPM mendominasi struktur anggaran dengan porsi 77%, sementara SBSN berkontribusi 17% dan PHLN sebesar 6% dari keseluruhan pagu.

Dari sisi kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I mencatat realisasi keuangan sebesar 88,73%, capaian yang lebih tinggi dibandingkan Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang berada pada angka 84,24%. Begitu pula pada aspek realisasi fisik, BWS Sulawesi I mencapai 85,84%, lebih baik dari capaian BWS Sumatera II yaitu 84,58%. Persentase penyerapan anggaran yang mendekati 90% menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I berjalan efektif dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana yang dialokasikan.

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

Pada akhir Tahun Anggaran 2025 Balai Wilayah Sungai Sulawesi I menempati peringkat ke-34 dari seluruh BWS dan BBWS. Untuk tingkat Balai Wilayah Sungai saja, BWS Sulawesi I menempati peringkat ke-22 dengan progress keuangan sebesar 88,73% dan progress fisik 85,84%.

Tabel 3.6 Peringkat BWS Sulawesi I antar BWS dan BBWS

No.	Balai	Pagu (Rp000)	Realisasi (Rp000)	Progres (%)	
		Total	Total	Keu	Fis
1	Balai Wilayah Sungai Sulawesi V	298.253.978	296.755.842	99,50	100,77
2	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I	801.775.022	797.635.841	99,48	96,43
3	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane	608.536.878	604.083.838	99,27	98,73
4	Balai Wilayah Sungai Maluku Utara	346.908.338	344.864.685	99,41	98,91

No.	Balai	Pagu (Rp000)	Realisasi (Rp000)	Progres (%)	
		Total	Total	Keu	Fis
5	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV	264.231.375	262.133.251	99,21	94,13
34	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	564.414.860	500.800.198	88,73	85,84

Progres Ditjen SDA	Peringkat BWS Sulawesi I
Keuangan : 91,40% Fisik : 92,75%	Peringkat ke-34 dari seluruh BWS dan BBWS

Tabel 3.7 Peringkat BWS Sulawesi I antar BWS

No.	Balai	Pagu (Rp000)	Realisasi (Rp000)	Progres (%)	
		Total	Total	Keu	Fis
1	Balai Wilayah Sungai Sulawesi V	298.253.978	296.755.842	99,50	100,77
2	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I	801.775.022	797.635.841	99,48	96,43
3	Balai Wilayah Sungai Maluku Utara	346.908.338	344.864.685	99,41	98,91
4	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV	264.231.375	262.133.251	99,21	94,13
5	Balai Wilayah Sungai Kalimantan II	751.129.493	795.074.208	99,03	99,63
22	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	564.414.860	500.800.198	88,73	85,84

Progres Ditjen SDA	Peringkat BWS Sulawesi I
Keuangan : 91,40% Fisik : 92,75%	Peringkat ke-22 dari seluruh BWS

Capaian peringkat pada tahun anggaran 2025 mengalami penurunan yang cukup besar, dimana pada tahun anggaran 2024 BWS Sulawesi I berada pada urutan ke-18 dari seluruh BWS dan BBWS dan urutan ke-14 dari seluruh BWS, sedangkan pada tahun anggaran 2025 BWS Sulawesi I berada pada urutan ke-34 dari seluruh BWS dan BBWS serta urutan ke-22 dari seluruh BWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Penurunan peringkat pada tahun ini dikarenakan adanya anggaran yang tidak bisa terserap dan juga paket fisik yang baru bisa dikerjakan di akhir tahun.

Balai Wilayah Sungai Sulawesi I akan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi penyerapan anggaran melalui penguatan koordinasi, percepatan proses administrasi, dan pemantauan progres secara berkala. Selain itu, berbagai langkah evaluatif akan dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul pada tahun sebelumnya, sehingga strategi perbaikan dapat dirumuskan secara lebih tepat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian kinerja dan peringkat balai dapat kembali meningkat pada tahun anggaran berikutnya.

3.4.1 DIPA Balai Wilayah Sungai Sulawesi I

Pada awal Tahun Anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I menerima pagu anggaran yang kemudian dibagi ke beberapa Satuan Kerja di lingkungan balai. Alokasi tersebut masing-masing diperuntukkan bagi Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi I, Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Sumber Air Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara, serta Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi I. Besaran anggaran untuk tiap satuan kerja adalah sebagai berikut:

- Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I: Rp. 47.480.559.000,-
- Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi I: Rp. 83.277.080.000,-
- SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi I: Rp. 124.061.000.000,-
- SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sulawesi I: Rp. 309.633.302.000,-
- SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi I: Rp. 139.738.523.000,-

Selama tahun anggaran berlangsung, terjadi beberapa penyesuaian signifikan terhadap pagu DIPA awal, sehingga total alokasi anggaran Balai Wilayah Sungai

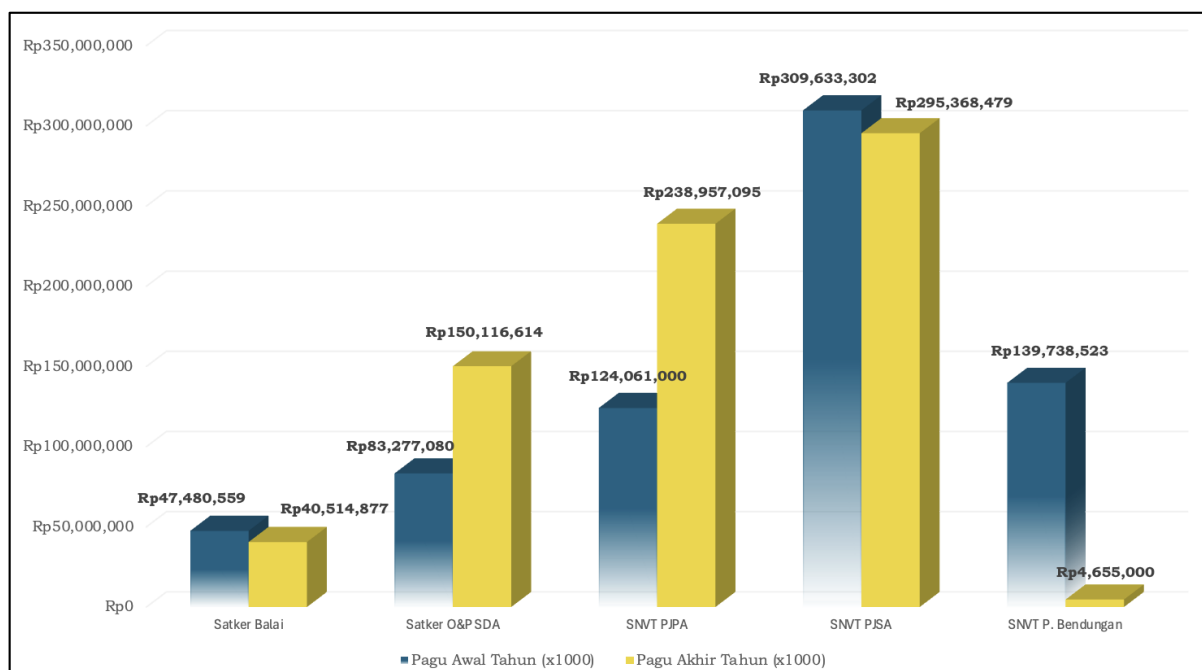
Sulawesi I pada akhir tahun mengalami perubahan. Anggaran tersebut kemudian didistribusikan kepada masing-masing Satuan Kerja dengan rincian alokasi sebagai berikut:

- Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I: Rp. 34.364.571.000,-
- Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi I: Rp. 144.567.650.000,-
- SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi I: Rp. 222.594.765.000,-
- SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sulawesi I: Rp. 164.878.502.000,-
- SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi I: Rp. 4.555.000.000,-

Total DIPA akhir Tahun Anggaran 2025 terbagi ke dalam tiga kategori sumber pendanaan, yaitu Rupiah Murni (RM), Pembiayaan Luar Negeri (PHLN), serta pendanaan SBSN. Proporsi masing-masing sumber dana adalah sebagai berikut:

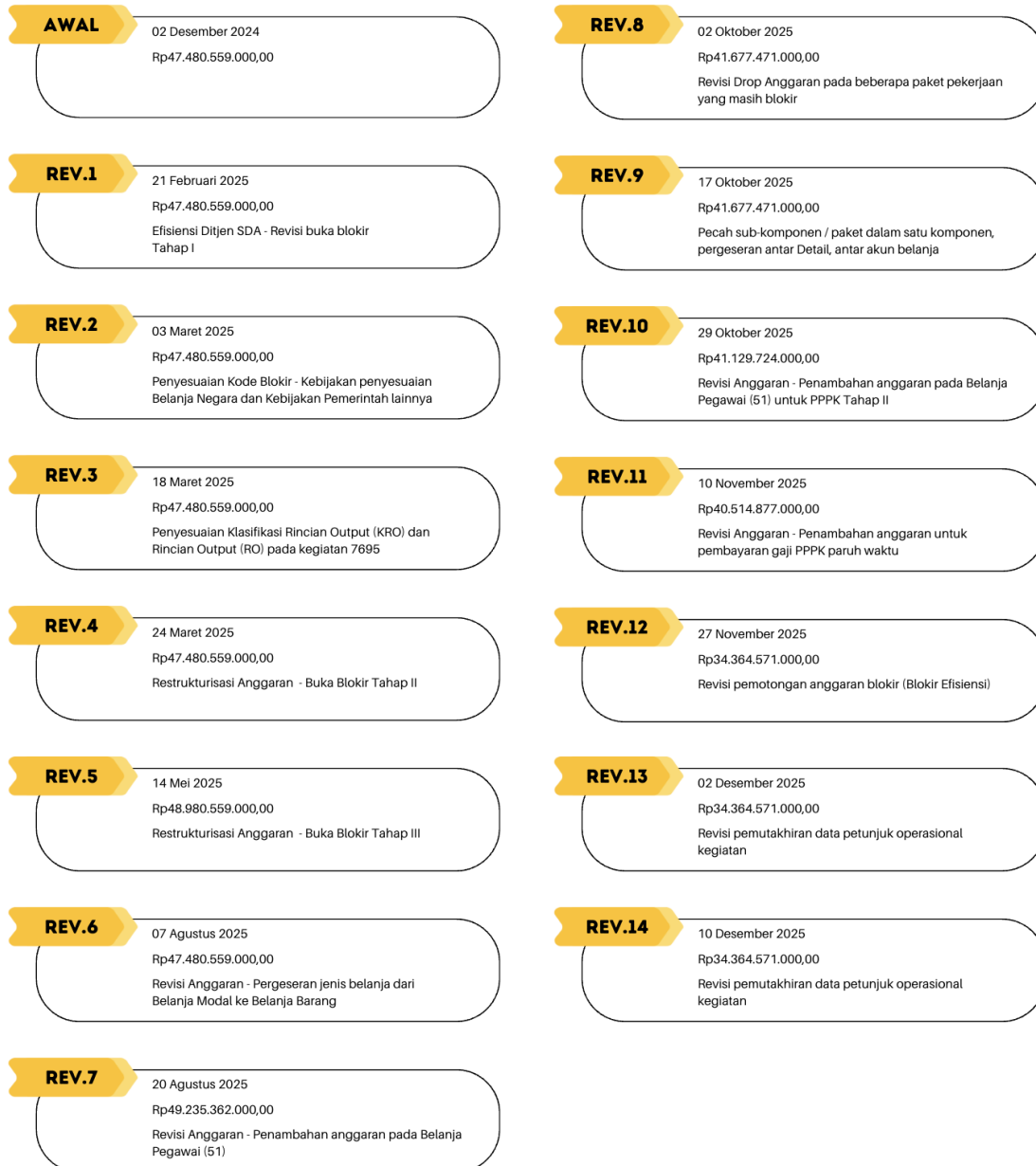
- Rupiah murni (RM): Rp. 524.193.001.000,-
- Pembiayaan Luar Negeri (PHLN): Rp. 113.961.436.000,-
- SBSN: Rp. 40.221.859.000,-

Perbandingan antara pagu anggaran diawal tahun dan diakhir tahun Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dapat dilihat pada grafik berikut.

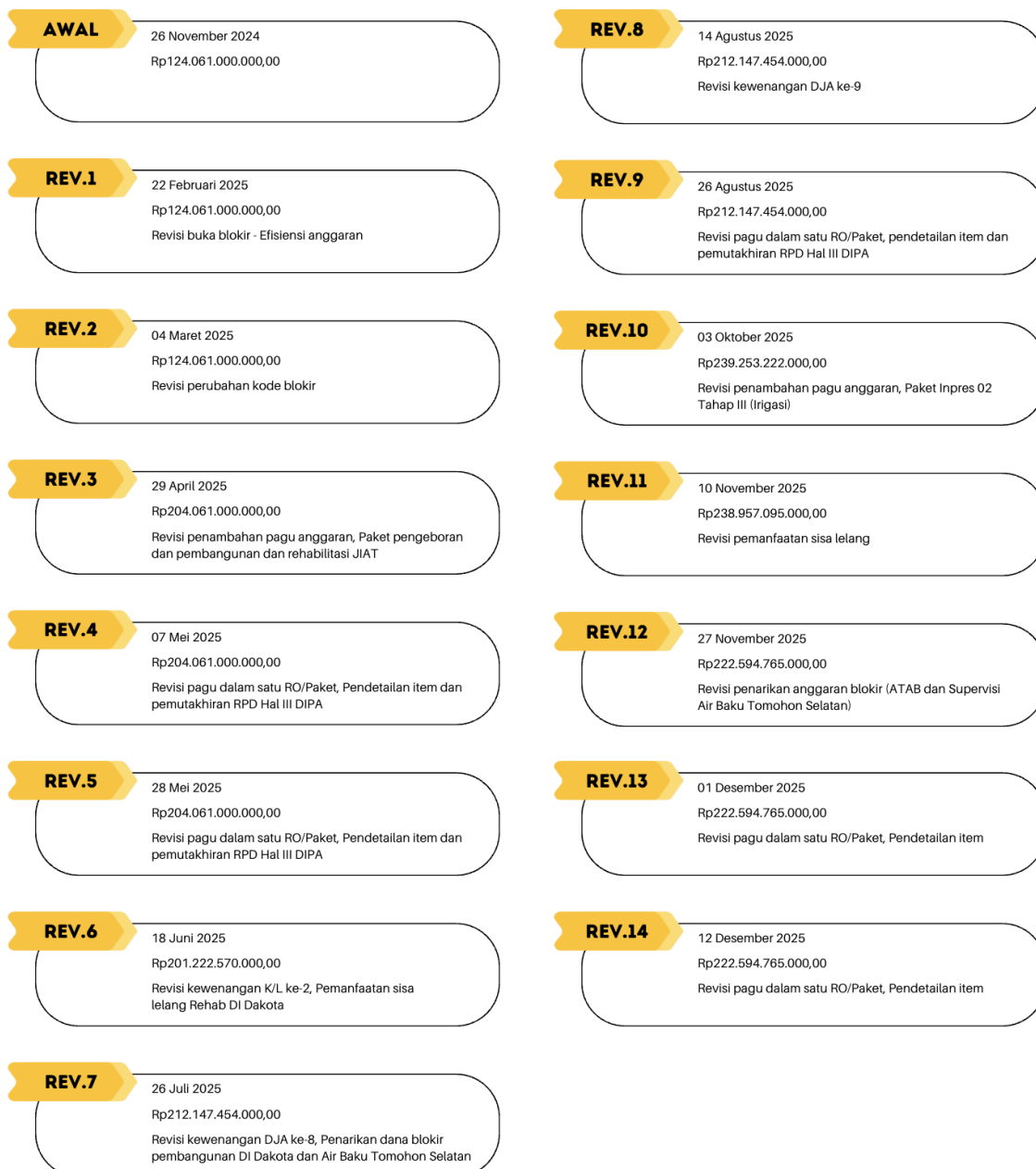


Gambar 3.3 Perbandingan Pagu Awal vs Pagu Akhir tiap Satuan Kerja

Secara garis besar kronologi perjalanan DIPA di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I tahun anggaran 2025 untuk masing-masing Satuan Kerja dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.4 Histori Pagu Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I

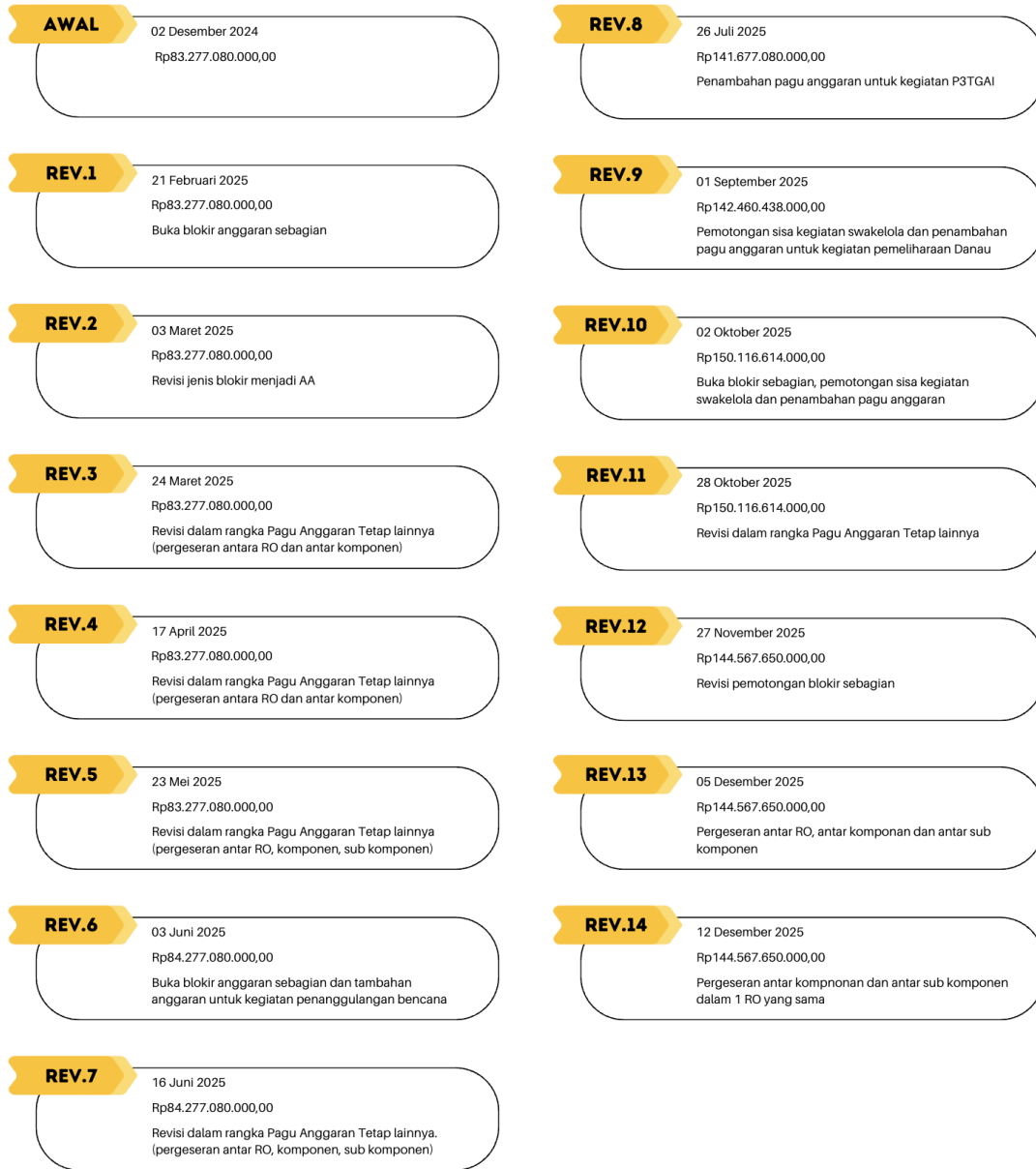


Gambar 3.5 Histori Pagu Satuan Kerja SNVT PIPA Sulawesi I Prov. Sulawesi Utara

Gambar 3.6 Histori Pagu Satuan Kerja SNVT PJSA Sulawesi I Prov. Sulawesi Utara



Gambar 3.7 Histori Pagu Satuan Kerja SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi I



Gambar 3.8 Histori Pagu Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi I

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi I selama Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui serangkaian penyesuaian perencanaan, pengendalian anggaran, serta pengaturan ulang prioritas kegiatan agar seluruh program tetap dapat terlaksana meskipun terjadi keterbatasan pada pagu anggaran, SDM, serta sarana pendukung. Dengan realisasi anggaran sebesar 88,73% dan realisasi fisik 85,84%, Balai tetap mampu menghasilkan output yang relevan dan berkualitas dengan mengoptimalkan seluruh input yang tersedia. Upaya efisiensi ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan penyelesaian pekerjaan, meminimalkan pemborosan, serta memastikan bahwa target kinerja tetap tercapai.

Secara umum, efisiensi dilakukan dengan menguatkan disiplin pelaksanaan anggaran, pemanfaatan fasilitas yang ada secara maksimal, serta koordinasi lintas unit yang lebih intensif untuk menghindari duplikasi pekerjaan. Langkah-langkah ini menjadi penting mengingat adanya penyesuaian pagu antarperiode dan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan.

3.5.1 Tantangan dan Kendala Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi dilakukan karena Balai menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- Penurunan pagu akhir tahun pada beberapa satuan kerja yang mengharuskan penyesuaian ulang skala prioritas kegiatan.
- Adanya hambatan administratif dan teknis, seperti proses revisi anggaran, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan dokumen yang tidak selalu dapat diselesaikan tepat waktu.

Tantangan-tantangan tersebut mendorong Balai melakukan penyesuaian strategi agar kegiatan tetap berjalan optimal.

3.5.2 Strategi dan Langkah Efisiensi yang Dilakukan

Untuk menjamin seluruh kegiatan dapat tetap terlaksana meskipun terjadi tekanan sumber daya, Balai menerapkan beberapa strategi efisiensi, antara lain:

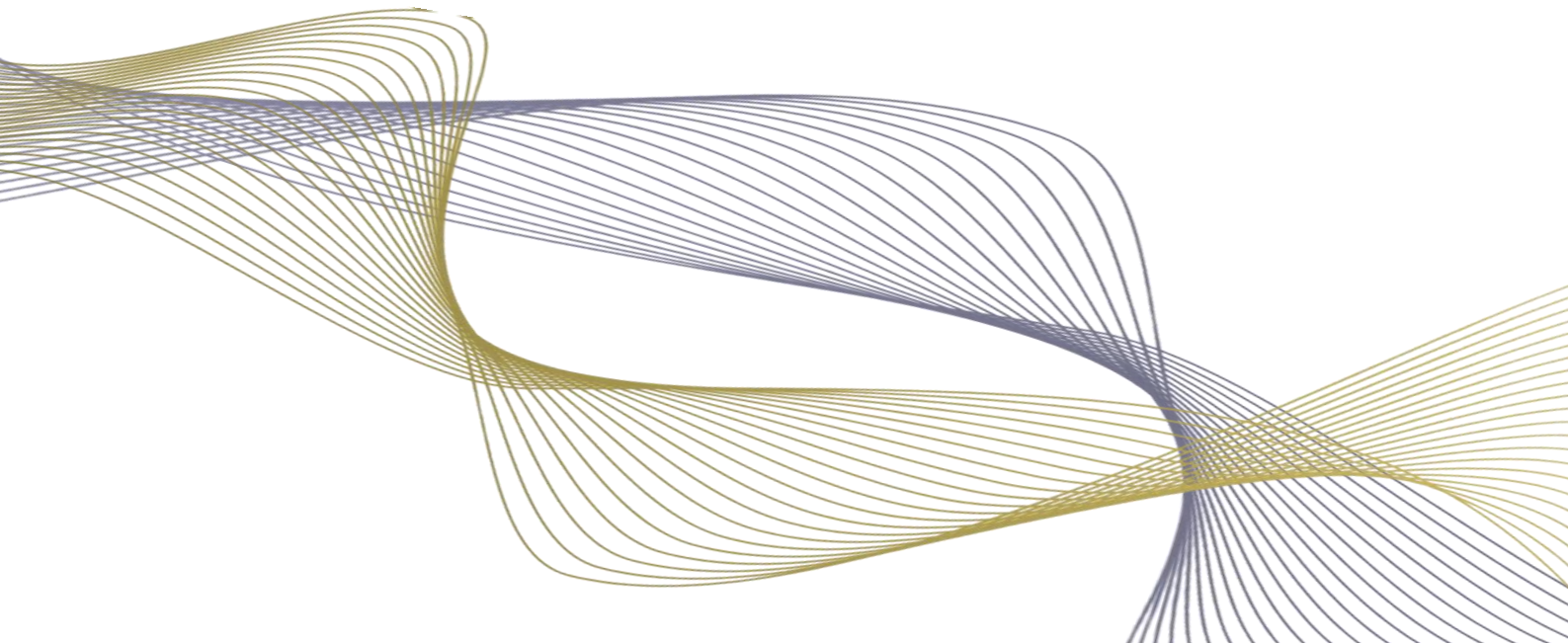
- Optimalisasi penggunaan anggaran dengan berbasis prioritas, yaitu mendahulukan kegiatan yang berdampak langsung pada capaian indikator kinerja program.

- Pengurangan komponen biaya non-esensial, seperti penghematan perjalanan dinas, efisiensi rapat/tatap muka fisik, dan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk koordinasi.
- Penguatan perencanaan teknis lebih awal, sehingga potensi pemborosan waktu dan biaya dapat ditekan sejak tahap awal perencanaan pekerjaan.
- Penguatan sistem pengendalian internal, terutama dalam monitoring anggaran dan realisasi fisik menggunakan e-monitoring, untuk mencegah deviasi yang tidak perlu.



BAB IV Penutup

Laporan Akhir – Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
2025



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025 didapatkan hasil sebagai berikut:

- Capaian kinerja berdasarkan Sasaran Program
 - a. Jumlah peningkatan kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan memiliki capaian kinerja 100% dengan kapasitas tampungan air yaitu 58,99 m³/kapita.
 - b. Adanya efisiensi pemanfaatan air irigasi sebesar 0,32 USD/m³.
 - c. Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air dengan persentase luas kawasan prioritas sebesar 0,6%.
 - d. Tingkat kinerja layanan infrastruktur Sumber Daya Air memiliki capaian kinerja 100% dengan persentase capaian 57,74%, lebih tinggi dari target PK Awal yaitu 56,03%
 - e. Meningkatnya pasokan air baku berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air baku untuk kebutuhan pertanian multikomoditas dengan persentase pemanfaatan sebesar 4,13% serta kondisi keandalan irigasi sebesar 0,16%.
 - f. Tingkat tata kelola pengelolaan Sumber Daya Air yang terintegrasi dengan capaian kerja 100% untuk tiap indikator sarannya.
 - g. Tingkat kualitas dukungan manajemen yaitu 96,72%
- Berdasarkan data pada aplikasi *e-Monitoring* didapatkan realisasi keuangan sebesar Rp500.800.198.000 dengan persentase progress keuangan 88,73% dan persentase progress fisik sebesar 85,84%.

4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Hasil evaluasi kinerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa capaian program dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Keberhasilan didorong oleh koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, dukungan teknis dan fasilitasi lapangan, kesiapan dokumen dasar, serta ketersediaan SDM dan sarana-prasarana yang memadai. Di sisi lain, ketidaktercapaian target terutama disebabkan oleh lamanya proses pengadaan pada beberapa kegiatan swakelola, kendala pertanahan, keterlambatan pelaksanaan beberapa paket yang baru dimulai di akhir tahun,

kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan, serta hambatan distribusi material di daerah sulit akses. Keseluruhan faktor tersebut berpengaruh terhadap optimalnya penyerapan anggaran dan progres fisik pekerjaan.

4.3 Rekomendasi Langkah dan Tindak Lanjut

Berikut beberapa langkah-langkah yang telah disiapkan sebagai komitmen peningkatan kinerja pada tahun mendatang, antara lain:

- a. Melakukan perencanaan dan penganggaran rencana program dan kegiatan lebih dini.
- b. Meningkatkan kompetensi manajerial dari tiap personel baik di lapangan maupun di kantor BWS Sulawesi I.
- c. Membuat *command center* sebagai pusat komando antara pekerjaan di lapangan dan juga administrasi di kantor BWS Sulawesi I, agar tercipta koordinasi dan sinergitas yang baik.



LAMPIRAN

Laporan Akhir – Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
2025

